



LAPORAN AKHIR KAJIAN

Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi Kota Gorontalo: Sebuah Strategi Akselerasi Pembangunan Regional, Pemerataan, dan Peningkatan Kinerja Central Place

Tim Peneliti

Prof. Dr. Ir. Syarwani Canon, M.Si
Dr. Ir. Mohammad Yusuf Tuloli, S.T., M.T
Dr. Ir. Buyung Machmoed, S.T., M.Eng
Ratih Ikawaty R. Hatu, S.T., M.T
Ivana Butolo, SE., MP
Muhammad Anugrah Rahman, S.T., M.PWK

**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Gorontalo**

2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	3
BAB II TINJAUAN TEORI.....	4
2.1 Teori Central Place.....	4
2.2 Core Periphery Model.....	4
2.3 Growth Pole	5
2.4 Urban Sprawl & Spatial Planning	6
2.2 Fiscal Federalism	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1 Pendekatan Penelitian	9
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	9
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	9
3.4 Analisis Spasial (GIS)	10
3.5 Analisis Statistik Kuantitatif.....	11
3.6 Analisis Statistika Deskriptif	12
3.7 Desain Skenario Kebijakan	12
3.8 Waktu Penelitian	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Sejarah Perkembangan Kota	14
4.2 Analisis Spasial.....	27
4.3 Kajian Proyeksi dan Prediksi Tren Perkembangan Gorontalo.....	44
4.4 Kajian Aktivitas Sosial Ekonomi	70
BAB V REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Luas dan Populasi antar Ibukota Provinsi di Indonesia.....	1
Tabel 2 Tujuan Penelitian	10
Tabel 3 Luas Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2000	20
Tabel 4 . Luas Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010	21
Tabel 5 Kecamatan Pemekaran di Kota Gorontalo	22
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kota Gorontalo	23
Tabel 7. Perubahan Luas Sawah di Wilayah Kajian Tahun 2013-2022	33
Tabel 8. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Permukiman Tahun 2013-2022.....	34
Tabel 9. Hasil Skoring Klasifikasi Wilayah Peri Urban Kota Gorontalo	40
Tabel 10 Perbandingan Antar Model	45
Tabel 11 Perbandingan Antar Model	49
Tabel 12 Perbandingan Antar Model terhadap Tenaga Kerja	53
Tabel 13 Perbandingan Antar Model terhadap Serapan Tenaga Kerja.....	57
Tabel 14 Keterkaitan Ekonomi Antara Kota Gorontalo dan Wilayah Hinterland.....	62
Tabel 15. Matriks Mobilitas Penduduk Antar Wilayah	66
Tabel 16. Perbandingan Persepsi Masyarakat di Wilayah Aglomerasi Gorontalo	69
Tabel 17. Perbandingan Persepsi Pelaku Usaha di Kawasan Aglomerasi Gorontalo.....	73
Tabel 18. Perspektif Aglomerasi oleh Tokoh Masyarakat.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Central Place Untuk Kota Gorontalo	4
Gambar 2 Ilustrasi Core–Periphery Model (Friedmann, 1966) Untuk Kota Gorontalo	5
Gambar 3 Ilustrasi Growth Pole Untuk Kota Gorontalo	6
Gambar 4 Ilustrasi Urban Sprawl & Spatial Planning Untuk Kota Gorontalo	7
Gambar 5 Ilustrasi Fiscal Federalism antara Kota Gorontalo dan wilayah Sekitar	8
Gambar 6 Skema Penelitian.....	13
Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Permukiman Tahun 2013.....	32
Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan Permukiman Tahun 2022.....	33
Gambar 9. Peta Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2013	35
Gambar 10. Peta Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2022	36
Gambar 11. Spatial Autocorrelation Moran'I.....	38
Gambar 12. Peta Analisis Autokorelasi Spasial <i>Hotspot Getis-Ord Gi*</i>	39
Gambar 13. Klasifikasi Wilayah Peri Urban Kota Gorontalo	41
Gambar 14. Mobilitas Penduduk Antar Wilayah.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Gorontalo memiliki luas hanya 79,59 km², atau sekitar 0,65% dari total luas Provinsi Gorontalo (11.257,07 km²). Luasan ini menempatkannya pada posisi ke-33 dari 38 ibukota provinsi di Indonesia, bahkan menjadi ibukota terkecil di Sulawesi. Dengan keterbatasan ruang yang relatif sempit, Kota Gorontalo menghadapi tantangan serius dalam menampung dinamika urbanisasi, ekspansi ekonomi, kebutuhan penataan kota, bahkan infrastruktur perkotaan. Perbandingan luas dan populasi antar ibukota Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Perbandingan Luas dan Populasi antar Ibukota Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi		Ibu Kota		
	Nama	Luas (km ²)	Nama	Luas (km ²)	Persentase
4	Sulawesi Barat	16,787.18	Kabupaten Mamuju *)	4,999.69	29.78%
13	Sulawesi Tengah	61,841.29	Kota Palu	395.06	0.64%
19	Sulawesi Tenggara	38,067.70	Kota Kendari	295.89	0.78%
25	Sulawesi Selatan	46,717.48	Kota Makassar	175.77	0.38%
27	Sulawesi Utara	13,892.47	Kota Manado	157.27	1.13%
33	Gorontalo	12,215.44	Kota Gorontalo	79.59	0.65%
34	Aceh	57,956.00	Kota Banda Aceh	61.36	0.11%
35	Nusa Tenggara Barat	20,153.15	Kota Mataram	61.3	0.30%
36	DKI Jakarta	661.52	Jakarta Pusat *)	47.9	7.24%
37	DI Yogyakarta	3,133.15	Kota Yogyakarta *)	32.5	1.04%
38	Maluku Utara	31.982.50	Kota Sofifi	20.98	0.07%

Sumber: BPS, diolah.

Menurut teori *spatial carrying capacity*, keterbatasan fisik suatu kota akan menghambat fungsi optimalnya sebagai pusat layanan, sehingga penataan kembali wilayah administratif menjadi kebutuhan strategis. Dengan populasi 204.629 jiwa, Kota Gorontalo mencatat kepadatan 2.589 jiwa/km², salah satu yang tertinggi di kawasan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Tingginya kepadatan penduduk ini memicu fenomena *urban sprawl* ke wilayah sekitar, terutama Kecamatan Telaga dan Tilango (Kabupaten Gorontalo) serta Kecamatan Tapa dan Kabila (Bone Bolango). Pertumbuhan permukiman dan komersial yang meluber ke hinterland mencerminkan keterbatasan daya tampung kota inti, serta lemahnya pengendalian tata ruang lintas batas administratif. Data RTRW menunjukkan tren konversi lahan pertanian subur menjadi

kawasan terbangun terus meningkat, sehingga mengancam ketahanan pangan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Ketika aktivitas perkotaan melampaui daya tampung kota, teori perencanaan kota mengarahkan pada konsep *urban expansion* dan *suburbanisasi*, yakni pengembangan kawasan baru untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Namun, perluasan ini harus disertai perencanaan infrastruktur yang memadai—jalan, transportasi publik, dan fasilitas dasar—agar tidak menimbulkan keterbatasan aksesibilitas dan fragmentasi wilayah. Pendekatan *spatial structure planning* menekankan pentingnya menciptakan jaringan infrastruktur yang terhubung antara pusat dan pinggiran, sehingga perluasan kota tidak sekadar perluasan lahan fisik, melainkan juga pembangunan sistem yang mendukung aktivitas baru.

Fenomena *urban sprawl* di Gorontalo juga membawa implikasi pada inefisiensi aglomerasi. Idealnya, aglomerasi menciptakan efisiensi biaya dan produktivitas melalui kedekatan geografis (*economies of agglomeration*). Namun, keterbatasan lahan dan fragmentasi tata ruang justru menimbulkan distorsi. Harga lahan di pusat kota melonjak, mendorong investasi ke hinterland tanpa perencanaan spasial memadai. Akibatnya, pembentukan klaster industri yang efisien terhambat. Selain itu, muncul *mismatch fiskal*: Kota Gorontalo menanggung beban layanan publik tingkat tinggi (rumah sakit rujukan, universitas, pusat perdagangan), sementara penerimaan pajak sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah “sprawl” justru masuk ke kas kabupaten. Sebaliknya, kabupaten harus membiayai infrastruktur dasar bagi penduduk yang aktivitas ekonominya berpusat di Kota Gorontalo. Ketidakseimbangan ini menurunkan kualitas layanan publik sekaligus memperlebar ketimpangan fiskal antarwilayah.

Urbanisasi yang tidak terkendali juga memicu persoalan sosial-ekologis. Konversi lahan produktif di hinterland menyebabkan hilangnya fungsi ekologis sebagai daerah resapan air. Data KLHS Provinsi Gorontalo menunjukkan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih jauh dari ideal 30% luas kota, dengan realisasi kurang dari 10%. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di kawasan inti maupun perbatasan. Dari sisi sosial, terjadi disparitas layanan: penduduk yang tinggal di kawasan “luberan” sulit mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan standar Kota Gorontalo, sementara kabupaten belum mampu menyediakan kualitas layanan yang sepadan. Hal ini berpotensi menimbulkan segregasi sosial-ekonomi, memperlebar ketimpangan antarwilayah, serta melemahkan kohesi sosial masyarakat aglomerasi.

Dengan demikian, keterbatasan ruang, tingginya kepadatan, fenomena *urban sprawl*, tekanan fiskal, dan masalah infrastruktur menegaskan urgensi penataan kembali wilayah administratif Kota Gorontalo. Penataan ini bukan hanya persoalan batas teritorial, tetapi juga upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting Kota Gorontalo dan hinterland?
2. Bagaimana proyeksi tren urban sprawl, kepadatan, dan peran central place?
3. Bagaimana dinamika aktivitas sosial-ekonomi kawasan aglomerasi?
4. Strategi kebijakan apa yang paling tepat untuk penataan kembali wilayah aglomerasi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menyajikan profil eksisting Wilayah Administrasi –wilayah fungsional Kota Gorontalo.
2. Menghasilkan proyeksi tren kepadatan, urban sprawl, dan peran central place.
3. Menganalisis aktivitas aglomerasi sosial-ekonomi Wilayah Administrasi dan wilayah fungsional Kota Gorontalo.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan penataan batas administratif.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini Adalah:

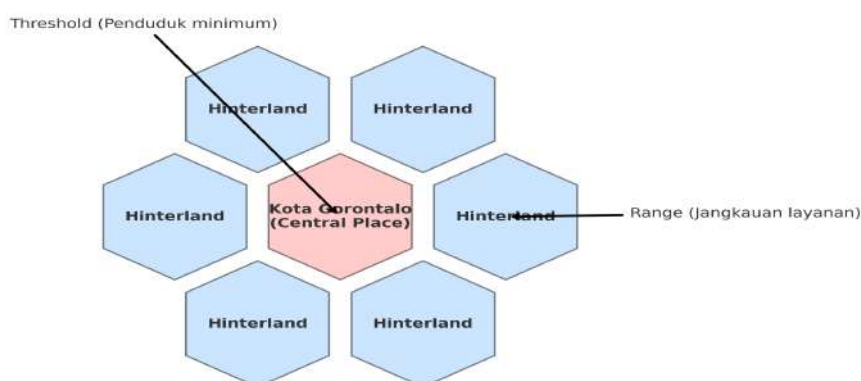
1. Kajian Kondisi Eksisting Kota Gorontalo (wilayah administrasi dan wilayah fungsional).
2. Kajian Proyeksi dan Prediksi Tren Perkembangan Kota Gorontalo.
3. Kajian Aktivitas Sosial-Ekonomi Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori *Central Place*

Teori *Central Place* (Christaller, 1933) menjelaskan bahwa sebuah kota berfungsi sebagai pusat pelayanan (service center) bagi wilayah sekitarnya dengan konsep threshold (jumlah minimum penduduk untuk menopang layanan) dan range (jarak maksimum yang bersedia ditempuh konsumen). Kota Gorontalo, sebagai ibu kota provinsi, telah menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan yang melayani Provinsi Gorontalo bahkan lintas daerah. Namun, luas administratif yang kecil (79,03 km²) membatasi kapasitas kota untuk menampung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Akibatnya, sebagian besar permintaan layanan meluber ke hinterland, menciptakan beban infrastruktur yang tidak seimbang. *Kota Gorontalo, secara teori Central Place menegaskan bahwa perluasan batas administratif kota diperlukan agar threshold dan range layanan dapat dikelola secara lebih efisien, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai pusat pertumbuhan regional.*

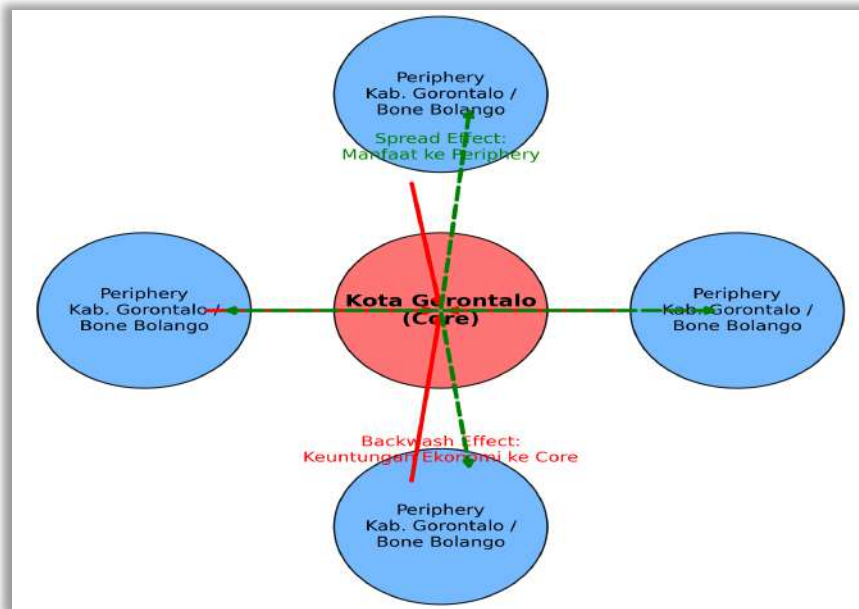


Gambar 1. Ilustrasi Central Place Untuk Kota Gorontalo

2.2 Core Periphery Model

Model Core–Periphery menggambarkan hubungan timpang antara pusat (core) sebagai pemegang kendali ekonomi dan pinggiran (periphery) yang sering kali hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya atau ruang perluasan. Kota Gorontalo adalah inti (core) aktivitas pemerintahan dan ekonomi, sementara Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango menjadi periphery yang menanggung dampak urban sprawl tanpa kompensasi fiskal yang sepadan. Ketidakselarasan ini berpotensi melanggengkan ketimpangan, di mana pusat memperoleh keuntungan ekonomi, sementara pinggiran

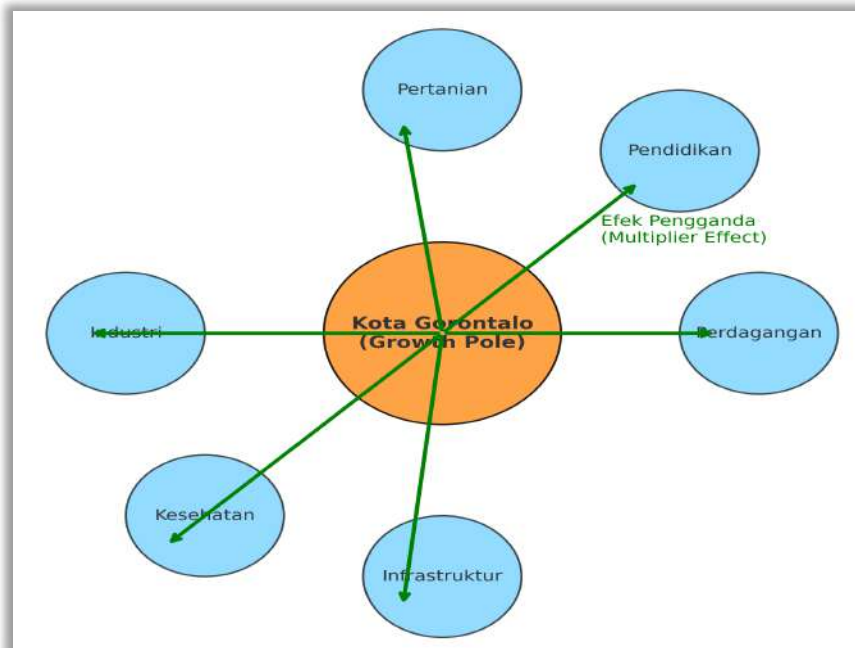
menanggung beban ekologis dan sosial. Bagi Kota Gorontalo, model ini menunjukkan urgensi integrasi administratif agar relasi pusat–pinggiran tidak eksploitatif, melainkan menghasilkan efek penyebaran (spread effect) yang merata di seluruh kawasan aglomerasi.



Gambar 2 Ilustrasi Core–Periphery Model (Friedmann, 1966) Untuk Kota Gorontalo

2.3 Growth Pole Theory

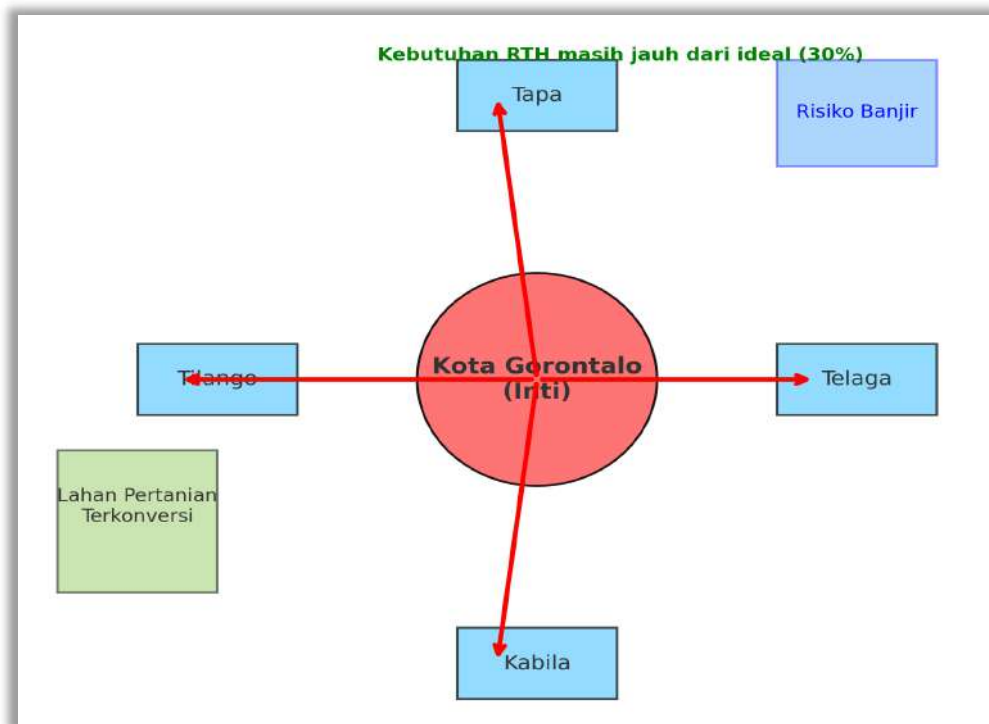
Teori Growth Pole (Perroux, 1950) menekankan bahwa pembangunan tidak terjadi secara merata, melainkan terpusat pada “kutub pertumbuhan” (growth pole) yang mampu mendorong sektor-sektor lain melalui efek pengganda (multiplier effect). Kota Gorontalo memiliki potensi sebagai kutub pertumbuhan regional, terutama karena konsentrasi fasilitas pendidikan tinggi, rumah sakit rujukan, dan pusat perdagangan provinsi. Namun, keterbatasan ruang dan fragmentasi tata kelola membuat efek pertumbuhan ini tidak menyebar optimal. Tanpa integrasi kelembagaan dan perencanaan kawasan, pertumbuhan Gorontalo berisiko menjadi eksklusif hanya bagi pusat kota, alih-alih mendorong pembangunan wilayah hinterland. *Penerapan Growth Pole Theory di Gorontalo menegaskan perlunya desain kawasan metropolitan atau aglomerasi resmi agar peran kota sebagai kutub pertumbuhan benar-benar mampu memacu pemerataan pembangunan regional.*



Gambar 3 Ilustrasi Growth Pole Untuk Kota Gorontalo

2.4 Urban Sprawl & Spatial Planning

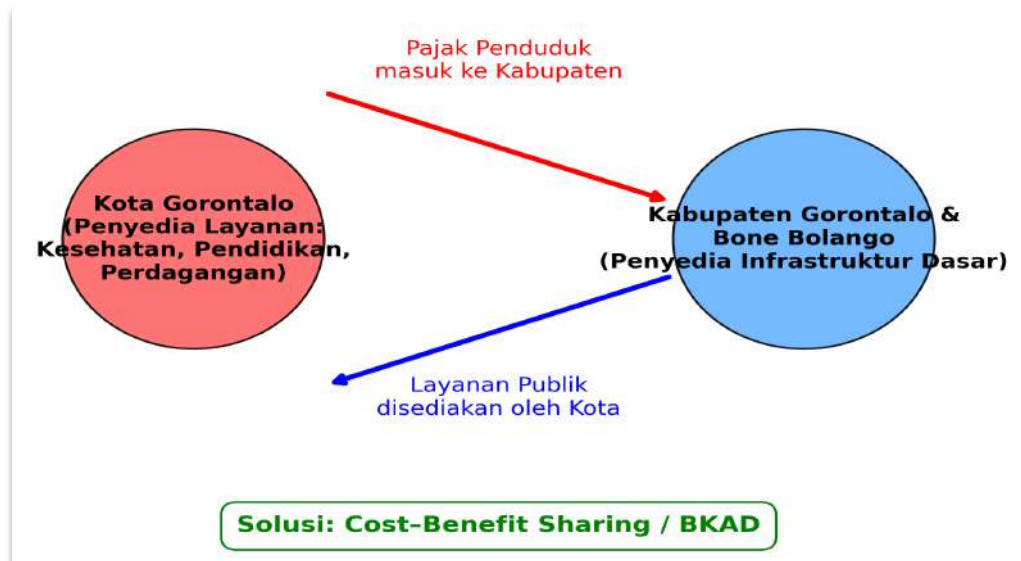
Fenomena urban sprawl terjadi ketika pertumbuhan kota melampaui batas administratifnya, sering kali tidak terkendali dan tanpa perencanaan spasial yang memadai. Kota Gorontalo telah mengalami hal ini, dengan perluasan permukiman dan kawasan komersial ke Telaga, Tilango, Tapa, dan Kabila. Konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun menimbulkan masalah ekologis, seperti berkurangnya daerah resapan air dan meningkatnya risiko banjir. RTRW dan KLHS Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Gorontalo masih jauh dari standar ideal, yang memperparah dampak sprawl. *Dalam konteks Gorontalo, penerapan konsep tata ruang menegaskan perlunya perluasan administratif dan sinkronisasi RTRW antarwilayah, agar urban sprawl dapat diarahkan menjadi pertumbuhan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan.*



Gambar 4 Ilustrasi Urban Sprawl & Spatial Planning Untuk Kota Gorontalo

2.5 Fiscal Federalism

Konsep Fiscal Federalism menyoroti pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat, daerah, dan antarwilayah, termasuk mekanisme pembiayaan layanan publik. Dalam konteks aglomerasi, mismatch fiskal sering muncul ketika satu daerah menanggung beban layanan publik yang digunakan oleh penduduk dari daerah lain, tetapi tidak memperoleh bagian penerimaan pajak yang memadai. Kota Gorontalo menghadapi masalah ini: layanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan pusat perdagangan disediakan oleh kota, tetapi sebagian besar penduduk hinterland yang memanfaatkannya menyumbang pajak ke kabupaten. Sebaliknya, kabupaten harus menanggung pembiayaan infrastruktur dasar untuk penduduk yang aktivitas ekonominya berpusat di Kota Gorontalo. *Teori Fiscal Federalism dalam kasus Gorontalo mendukung perlunya mekanisme cost-benefit sharing atau pembentukan Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD), agar pembiayaan dan manfaat ekonomi aglomerasi terbagi secara adil.*



Gambar 5 Ilustrasi Fiscal Federalism antara Kota Gorontalo dan wilayah Sekitar

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) yang mengintegrasikan analisis kuantitatif, kualitatif, dan spasial dalam satu kerangka analisis terpadu. Pendekatan ini dipilih karena fenomena aglomerasi Kota Gorontalo memiliki dimensi sosial-ekonomi, spasial, tata kelola, dan kelembagaan yang kompleks, sehingga tidak dapat dijelaskan secara tunggal oleh data statistik atau narasi kualitatif. Integrasi metode diharapkan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif, valid, dan aplikatif untuk perumusan kebijakan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

A. Data Sekunder

1. Publikasi BPS: *Provinsi Gorontalo Dalam Angka, Kota Gorontalo Dalam Angka, Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, Bone Bolango Dalam Angka* (data kependudukan, PDRB menurut sektor ekonomi, kemiskinan, IPM).
2. Dokumen perencanaan: RTRW Kota/Kabupaten, RPJMD, KLHS Provinsi.
3. Regulasi tata ruang dan perundangan (UU 23/2014, Kepmendagri batas wilayah).
4. Data spasial: citra satelit resolusi tinggi, peta penggunaan lahan, dan peta infrastruktur.

B. Data Primer

1. Wawancara mendalam: pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, tokoh adat, dan komunitas masyarakat.
2. Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan memvalidasi temuan awal dan merumuskan alternatif Solusi kepada tiga kelompok: tiga kelompok : (1)pemerintah/OPD, (2)dunia usaha, (3)masyarakat sipil.
3. Observasi lapangan: kawasan Telaga, Tilango, Kabila, dan Tapa untuk ground-truthing hasil GIS.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan: Peninjauan langsung lokasi sprawl, infrastruktur, dan kawasan perbatasan.

2. Wawancara Semi-Terstruktur: Untuk menangkap persepsi, masalah kelembagaan, dan distribusi manfaat aglomerasi.
3. FGD Tematik: Forum validasi data, penggalan opsi kebijakan, dan evaluasi skenario.
4. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data statistik, regulasi, dan dokumen perencanaan resmi.

Tabel 2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian	Ruang Lingkup Penelitian	Metode & Teknik Analisis	Output Utama
1. Menyajikan profil eksisting wilayah administrasi dan wilayah fungsional Kota Gorontalo	Kajian kondisi eksisting Kota Gorontalo (wilayah administrasi dan fungsional)	- Observasi lapangan (Telaga, Tilango, Kabila, Tapa) - GIS: Land Use Change Detection, pemetaan kepadatan dan infrastruktur	- Peta baseline urban sprawl dan infrastruktur - Dokumen profil eksisting kota dan hinterland
2. Menghasilkan proyeksi tren kepadatan, urban sprawl, dan peran central place	Kajian proyeksi dan prediksi tren perkembangan Kota Gorontalo	- Time-Series Analysis untuk tren kepadatan, urbanisasi, PDRB - Spatial Regression untuk hubungan kepadatan dan akses layanan	- Grafik tren dan proyeksi kepadatan - Peta proyeksi urban sprawl - Analisis peran Kota Gorontalo sebagai pusat
3. Menganalisis aktivitas sosial-ekonomi kawasan wilayah fungsional Kota Gorontalo	Kajian aktivitas sosial-ekonomi Kota Gorontalo	- Analisis deskriptif kuantitatif	- Gambaran pola interaksi dan intensitas aktivitas sosial-ekonomi antar wilayah dalam wilayah fungsional Kawasan Kota Gorontalo
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan penataan batas administratif	Seluruh fokus kajian (kondisi eksisting, tren, dan sosial-ekonomi)	- Triangulasi hasil kuantitatif, kualitatif, dan spasial - Desain skenario kebijakan (Perluasan administratif, Metropolitan, Cost-Sharing/BKAD)	- Policy brief - Model skenario kebijakan - Rekomendasi teknokratik untuk Pemkot, Pemkab, dan Pemprov

3.4 Analisis Spasial

Pemetaan perubahan tata guna lahan, kepadatan, dan aksesibilitas dengan tujuan untuk menganalisis pola perubahan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, dan keterjangkauan layanan publik secara visual dan kuantitatif. Dengan teknik Analisis sebagai berikut:

1. Tinjauan Kebijakan Tata Ruang

Tujuan: Mengidentifikasi arahan kebijakan berdasarkan rancana tata ruang pada masing-masing wilayah khususnya berkaitan dengan arahan pengembangan kawasan terbangun atau kawasan permukiman.

Data: Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Walikota Tentang Rencana Detail Tata Ruang

Teknik: Analisis deskriptif kualitatif

Output: Deskripsi terkait arahan fungsi kawasan permukiman pada wilayah kajian

2. Land Use Change Detection:

Tujuan: Mengukur perubahan tata guna lahan, khususnya konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun (% per tahun).

Data: Citra satelit multi-temporal (Landsat/Sentinel), peta RTRW, data BPN, hasil survey lapangan.

Teknik:

Overlay citra satelit periode berbeda.

Penghitungan luas perubahan area menggunakan perangkat lunak GIS (ArcGIS/QGIS).

Analisis tren perubahan lahan per kecamatan.

Output: Peta konversi lahan dan tren perubahan penggunaan lahan per tahun.

3. Spatial Autocorrelation (Moran's I, LISA):

Tujuan: Mengidentifikasi pola persebaran kepadatan penduduk dan akses layanan publik secara spasial.

Data: Data kependudukan, fasilitas publik, jaringan jalan, dan koordinat lokasi layanan.

Teknik:

- Analisis Global Moran's I untuk mengukur tingkat autokorelasi spasial secara keseluruhan.
- Local Indicators of Spatial Association (LISA) untuk mengidentifikasi kluster daerah padat atau kurang terlayani.

Output: Peta kluster kepadatan dan akses layanan publik.

4. Tipologi Wilayah Peri Urban

Tujuan: Mengidentifikasi dinamika perubahan ruang yang terjadi akibat ekspansi kota (*urban sprawl*) yang mendorong pergeseran fungsi dan struktur wilayah dari agraris menuju nonagraris.

Data: Variabel yang diukur dalam analisis antara lain penggunaan lahan, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan sebaran sarana dalam analisis tipologi wilayah peri-urban didasarkan pada relevansi empirisnya dalam menggambarkan perubahan karakter spasial dan sosial ekonomi wilayah pinggiran kota

Teknik: Analisis deskriptif, metode skoring, dan analisis spasial berbasis overlay.

Output: Peta tipologi wilayah peri urban Kota Gorontalo

3.5 Analisis Statistik Kuantitatif

Tren demografi, ekonomi, dan mismatch fiskal dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Mengukur tren demografi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan fiskal, dan beban pelayanan publik.
2. Time-Series Analysis: Proyeksi kepadatan penduduk, urbanisasi, dan PDRB sektoral.
3. Panel Data Analysis: Analisis distribusi fiskal antarwilayah (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Bone Bolango).
4. Regresi Tren: Penilaian korelasi variabel demografi, ekonomi, dan pelayanan publik.

3.6 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk memahami aktivitas sosial-ekonomi dalam kawasan aglomerasi melalui penyajian data angka yang diperoleh dari survei atau kuesioner. Analisis ini dilakukan dengan menghitung frekuensi, persentase, serta rata-rata pada indikator seperti mobilitas penduduk untuk bekerja atau bersekolah, pemanfaatan fasilitas publik lintas wilayah, serta keterlibatan dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan jasa. Melalui statistik deskriptif tersebut, peneliti dapat menggambarkan kecenderungan interaksi yang terjadi antara wilayah pusat kota dan wilayah sekitarnya dalam konteks pengoptimalan wilayah fungsional Kawasan Kota Gorontalo.

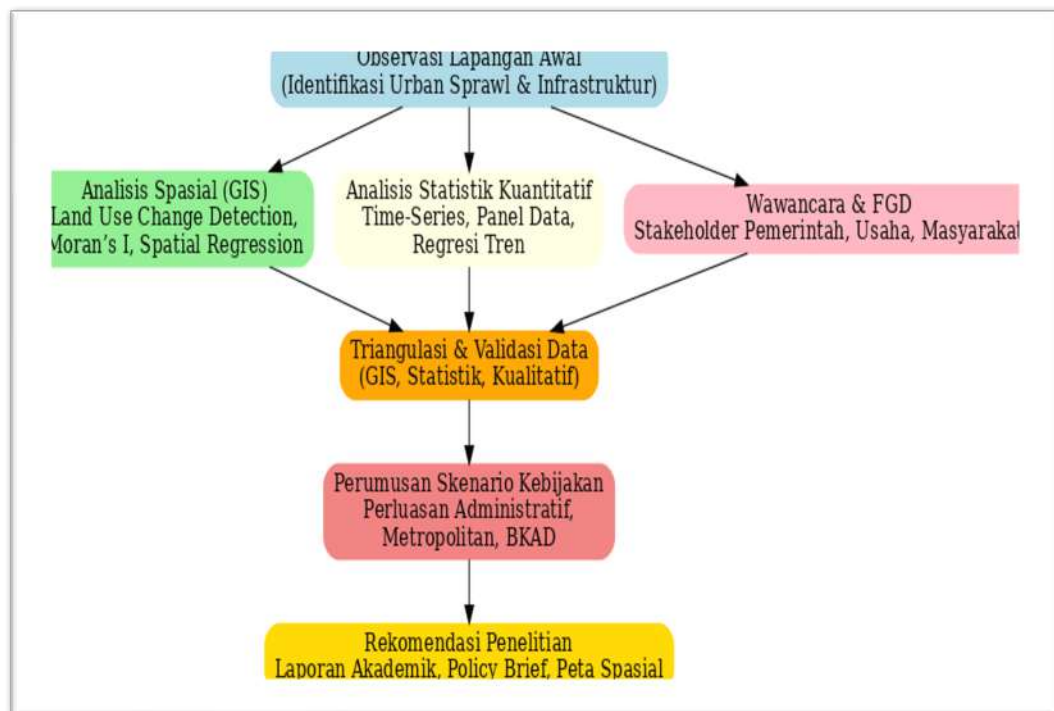
3.7 Desain Skenario Kebijakan

Untuk memperkaya rekomendasi, penelitian akan merumuskan tiga skenario utama:

1. Perluasan Administratif Kota: mengintegrasikan wilayah hinterland yang sudah terhubung fungsional..
2. Pembentukan Kawasan Metropolitan Resmi: Penataan lintas batas administratif dengan struktur kelembagaan formal.
3. Cost-Sharing & BKAD (Badan Kerja Sama Antar Daerah): Alternatif berbagi biaya layanan publik tanpa perluasan wilayah.

3.8 Perencanaan Waktu Penelitian

Penelitian dirancang untuk 12 minggu (3 bulan) dengan fokus wilayah prioritas (Telaga, Tilango, Kabila, Tapa). Namun, disarankan opsi perpanjangan hingga 5–6 bulan jika ingin menghasilkan rekomendasi kebijakan penuh untuk seluruh kawasan aglomerasi.



Gambar 6 Skema Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perkembangan Kota Gorontalo

Terjadinya masyarakat Gorontalo karena adanya daratan tempat pemukiman. Karena itu membicarakan terjadinya kelompok masyarakat, senantiasa diawali dengan proses terjadinya daratan Gorontalo. Beberapa pendapat tentang masyarakat Gorontalo menurut penuturan beberapa nara sumber (Daulima, 2006) : Salahudin Djafar (mantan sekretaris daerah)

“alkisah pada zaman purba semua dataran Gorontalo yang kita tempati sekarang ini, masih digenangi air laut dan merupakan lautan. Menurut tutur kata (*over levering*), suatu bangsa yang menamakan diri bangsa Weda dan berhulu negeri di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai dataran Gunung Boliyohuto”.

Menurut K. Kaluku dalam seminar adat bulan september 1971 menjelaskan :

“Bahwa masyarakat Gorontalo tumbuh bersamaan dengan terjadinya daratan Gorontalo. Semasih menjadi lautan masyarakat itu terdapat di Bangio/Pinogu dalam ketinggian 1902 m. Masyarakat ini mempunyai raja turun temurun sampai dengan Raja XVIII. Setelah timbul daratan, maka muncullah masyarakat dengan Raja I sampai dengan III. Bukti bukti keberadaan raja-raja ini, di Pinogu terdapat banyak makam keramat yang sudah berabad-abad umurnya namun sudah tidak dikenal nama pemiliknya”.

Dalam buku Lontara Kerajaan Luwu yang dikarang oleh Lagaligoyang, tersimpan pada Prof. Zainal Abidin di Makasar, yang diketahui dari tutur kata (*over levering*) hanyalah semasa dataran Gorontalo ini lambat laun menjadi kering akibat perkerutan kulit bumi (*upward pressure*). Bangsa Weda tersebut kelompok demi kelompok meninggalkan basis induknya dan memencar di daerah Gorontalo yang kedapatan kering itu (Daulima, 2006). Proses perpindahan ini tidak berlangsung sekaligus dan setiap yang meninggalkan basis induknya dikepalai oleh pemimpin masing-masing.

Jumlah kelompok yang menyebar sebanyak 21 kelompok dengan rincian : 2 kelompok ke barat, 2 kelompok ke timur, 4 kelompok ke timur tenggara (yang kemudian membentuk kerajaan Tuwawa), 5 kelompok juga ke timur (yang kemudian membentuk kerajaan Limutu/Limboto) serta 8 kelompok ke selatan. Bahwasanya

kerajaan kesatuan Hulonthalo adalah gabungan dari 17 kelompok. 17 kelompok ini lahir dari perpecahan-perpecahan kelompok asli tersebut di atas.

Daerah Kota Gorontalo sekarang ini adalah bekas Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Hulonthalo. Nama Gorontalo pada mulanya berasal dari kata Goa Lantalengo (orang Goa yang melancong), kemudian berubah menjadi Hulontalangi, lalu menjadi Hulonthalo. Oleh orang Belanda disebut Gorontalo (Daulima, 2006).

Orang yang pertama kali menginjakkan kakinya ke daerah ini berasal dari Kerajaan Goa. Sesudah itu menyusul pula orang-orang Bugis. Orang-orang Goa masuk sampai ke pedalaman. Di lereng Gunung Dumbo mereka bertemu dengan penduduk asli, kemudian terjadilah percampuran antara kedua suku ini. Lewat proses asimilasi penduduk itulah yang melahirkan orang Gorontalo sekarang. Penduduk Gorontalo inilah yang menggelarkan orang Goa tersebut dengan Goa Lantalengo. Lama kelamaan orang pegunungan tersebut kian bertambah. Atas inisiatif dari rajanya yang bernama Wadipalapa, Kerajaan Gorontalo meluaskan wilayahnya ke utara yaitu ke Duingingi (kampung Tuladenggi sekarang).

Keberadaan Kota Gorontalo pada zaman dahulu dikenal memiliki tiga tempat kedudukan yaitu Hulawa, Duingingi (sekarang Tuladenggi) yang keduanya terletak di pinggir sungai Bolango serta tempat ketiga adalah diantara dua kampung Biawao dan Limba B sekarang ini. Kedua kampung inilah pusat kelahiran Gorontalo yang kemudian dikenal sebagai Kota Gorontalo.

Sejarah awal kelahiran Kota Gorontalo sangat lekat dengan perjalanan panjang pemerintahan kerajaan yang pada masa itu turut mempengaruhi tahapan-tahapan dalam pembentukan wilayah komunitas masyarakat Gorontalo (Anonim, 2004).

Adapun sumber data menunjukkan kelahiran dan diresmikannya pemakaian Gorontalo sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Gorontalo adalah :

1. TaluE Jasin (1936; 18) “.... *Pada permulaan Tahun Hijriah 1140 berusaha Raja Botutihe hendak memindahkan Ibukota Gorontalo ke Kuwala yaitu bandar Gorontalo sekarang. Pada 6 hari kemudian Syahban tahun 1140 itu juga adalah kota itu lalu diduduki*”
2. Buku dalam tulisan Arab Sejarah Gorontalo (disimpan oleh Keluarga Botutihe di Suwawa) :
 - a. Pada tahun 1024 H Kerajaan Gorontalo berpindah ke Duingingi.
 - b. Pada tahun 1140 H. *6 hari bulan Syahban Kerajaan Gorontalo pindah dari Duingingi buat duduk di pinggir mulut kuala*”.

3. Anonim, 1968; 9) : *“Kapan kota itu selesai dibangun tidak dapat dipastikan. Yang jelas ialah bahwa pemakaian itu diresmikan pada tanggal 6 Syahban 1140 H atau 1728 tahun Masehi yang mempercepat Botutihe merealisasikan rencana pembangunan ialah diterimanya kabar bahwa Pemerintahan Belanda pada waktu itu sudah merencanakan akan menempatkan pegawai-pegawainya di negeri Hulondalo”*
4. Bastiaans, 1939 pada lampiran peta Bandar Gorontalo tercantum kalimat dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Daerah (Bendar) Gorontalo diperdirikan oleh Padoeka Raja Botutihe mulai didiami pada 6 hari bulan Syahban tahun Hijriah 1140, dipindahkan hoeloe negeri ini dari tanah Doengingi (kampoeng Toeladenggi)”.
5. Data-data lisan yang disampaikan oleh Abdullah Amu (bekas Gubernur Muda Propinsi Sulawesi Utara), Dj. Buloto, A. G. NauE, M. Kaluku, A. R. Maksum, D. H. Wantogia, J. H. Wantogia (dari Kabupaten Gorontalo) serta Sun Bone dan A. Tajabu (dari Kotamadya Gorontalo) kesemuanya sependapat bahwa 6 Syahban 1140 H adalah tanggal dan tahun kelahiran Kota Gorontalo.

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul itu jelaslah bahwa lahirnya Kota Gorontalo jatuh pada hari Kamis tanggal 6 Syahban 1140 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1728 Masehi yang kemudian menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Hari Lahir Kota Gorontalo tanggal 19 Maret 1728. Tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Gorontalo (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7).

Adapun asal usul nama Gorontalo yang diterangkan secara turun temurun dari beberapa sumber yang paling banyak diceritakan, yaitu:

1. Kata Gorontalo berasal dari kata **"Hulontalangi"**, yang bermakna **"Lembah Mulia"** Hulontalangi berasal dari dua suku kata, yaitu "Huluntu" yang berarti "Lembah" dan "Langi" yang berarti "Mulia".
2. Makna kata **"Hulontalangi"** yang lain adalah **"Daratan yang Tergenang"** Kata **"Hulontalangi"** dalam penerjemahan lain berasal dari dua suku kata, yaitu **"Huntu"** yang berarti "Onggokan Tanah" atau "Daratan", dan **"Langi-Langi"** yang berarti "Tergenang". Dapat diartikan menjadi "Daratan yang Tergenang Air" sesuai dengan cerita turun temurun masyarakat Gorontalo

3. Berasal dari kata "**Huidu Totolu**" atau "**Goenong Tello**", yang bermakna "**Tiga Gunung**". Jika ditelusuri sejarahnya, terdapat tiga gunung purba di semenanjung Gorontalo yaitu Gunung Malenggalila, Gunung Tilonggabila (berubah menjadi Tilongkabila) dan satu Gunung lagi yang tidak bernama. Adapun sebuah lembah di sebelah selatan Gunung Tilongkabila tersebut dikenal dengan nama "**Hulontalangi**" atau "**Hulontalo**" yang juga merupakan cikal bakal wilayah Kota Gorontalo. Dalam banyak literatur Portugis maupun Belanda (dan juga pada beberapa gambar peta), kata Goenong-Tello pun lebih banyak digunakan untuk menggambarkan wilayah ini
4. Kata Gorontalo berasal pula dari kata "**Pogulatalo**", yang bermakna "**Tempat Menunggu**". Kata "**Pogulatalo**" lambat laun berubah dalam ucapan masyarakat menjadi "**Hulatalo**"
5. Kata Gorontalo juga berasal dari kata "**Hulontalo**" atau "**Holontalo**" Kata Gorontalo ditengarai merupakan adaptasi dari nama Kerajaan Hulontalo di masa lampau. Nama Gorontalo sendiri diberikan oleh para penjelajah seperti Portugis maupun Belanda yang pernah datang ke Gorontalo. Kata Gorontalo sendiri diserap dari kata Holontalo atau Hulontalo

Awal kelahiran Kota Gorontalo sangat terkait dengan perjalanan sejarah pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan pada masa itu. Diketahui pula bahwa Raja Botutihelah pemegang peran menentukan dalam untaian sejarah lahirnya Kota Gorontalo. Adapun perhitungan penanggalan Hijriah dan tulisan Arab pada dokumen sejarah terbentuknya Gorontalo yang digunakan oleh pemerintahan Kerajaan Gorontalo pada masa itu menunjukkan kedekatan religius keIslamkan sejak jaman pemerintahan tersebut.

Berdasarkan sumber-sumber tertulis dapat dikemukakan data pemerintahan Raja Botutihe dengan data dan sumber-sumber sebagai berikut (Anonim, 2004) :

- a. TaluE Jasin, Sejarah Tua Gorontalo, (1936 hal. 18) : *"Pada tahun 1718 Paduka Raja Walangadi I mangkat, lalu diganti oleh anaknya yang tertua Raja Piola namanya. Pada pemerintahan Raja Piola selama 10 tahun tiada pentingnya sehingga ia mangkat, lalu diganti oleh adiknya Botutihe pada tahun 1728."*
- b. M. H. Lipoeto, Sejarah Gorontalo, Dua Lima Pohalaa hal. 1-5 : *"Piola wafat tahun 1710 calon pengganti adiknya bernama Jogugu Bulalonawa. Waktu akan penobatan Kimalaha Panggulo tiada setuju akan keangkatan itu. Kimalaha*

Panggulo mengatakan menurut kemauan rakyat ialah adiknya bernama Hatibidaa Botutihe. Diputuskan oleh Bantayo Poboide yang menjadi raja adalah Hatibidaa Botutihe”.

- c. Richard Tacco, Kebudayaan Suku Bangsa Gorontalo, (1956 hal. 30 & 34) :
“Penolakan Pangeran Bulalonawa menjadi raja dibawah kira-kira dalam tahun 1730, Bulalonawa tak jadi dinobatkan hanyalah adiknya yang bernama Botutihe menjadi raja di bawah”.
- d. J. G. F. Riedel, De Landschappen Haelantalo, Limoetoe, Bone, Boewalemo, En Katinggola of Andagile, tahun 1870 terjemahan N. Mooduto tahun 1968 halaman 26 mencantumkan :
“Sebagai raja di bawah sesudah Bia, Pijola sesudah Pijola Botutihe..... Botutihe seorang anak laki-laki dari Walangadi membuat kontrak dengan VOC pada 8 Juni 1737”.
- e. Dalam prasaran seminar adat Gorontalo di Limboto bulan September 1971, Prasaran dan Kecamatan Suwawa pada halaman 2 mencantumkan pemerintahan Raja Botutihe tahun 1728 (berakhir 1755).

Dari kelima sumber informasi atau data-data di atas cukuplah representatif bahwa pemerintahan Raja Botutihe berada di antara angka tahun 1710-1755 dimana pada masa pemerintahan kerajaan dari Duingingi ke pusat Kota Gorontalo sekarang ini.

Berdasarkan sejarah, sebelum terbentuknya kota pada tahun 1728, Gorontalo mendapat pengaruh dari beberapa kerajaan. Pada tahun 1272 di masa pemerintahan Raja Mo’oduto dari Kerajaan Suwawa, perahu layar Putri Rawe yang merupakan putri dari Raja Bone/Watampone Sulawesi Selatan. Putri ini mengembara mencari tanah jajahan dan merapat di Teluk Bunga Yono. Ketika lautan mengering/surut, perahu Ratu Rawe terdampar di Kampung Boneda’a. Kakak Putri Rawe yang bernama Sawerigading dari Makassar menyusul Putri Rawe, tetapi sayang bahteranya terdampar di Tanjung Api – Ampana (Sulawesi Tengah). Raja Mo’oduto akhirnya menikah dengan Putri Rawe, sehingga mulai saat itu terjadi proses asimilasi pada masyarakat Gorontalo hingga menurunkan generasi sekarang (Daulima, 2006).

Selain mendapat pengaruh dari kerajaan Bone, Gorontalo juga mendapat pengaruh dari Kerajaan Gowa dan Kerajaan Ternate. Masuknya pengaruh kedua kerajaan ini karena pada masa itu sering terjadi peperangan antara Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Limboto. Terakhir kali terjadi peperangan pada tahun 1664 (tanggal 12 Sya’ban 1084 Hijriah) dimana Limboto dibantu oleh Raja Ternate dan Gorontalo

dibantu oleh Raja Gowa. Beberapa tahun kemudian, atas prakarsa “Eyato”, yakni pejabat Kerajaan Gorontalo yang berpangkat Batibida’a (pejabat pelaksana syariah agama) dan “Popa”, pejabat Kerajaan Limboto yang berpangkat Wedana, terjadi persekutuan dari dua kerajaan ini. Dengan adanya persekutuan ini, kedua kerajaan merasa bersaudara tanpa melihat siapa yang tertua dan yang tertinggal antara keduanya.

Kerajaan Ternate ingin kembali menguasai Gorontalo dan Limboto dengan meminta bantuan VOC. Pada tahun 1674, Ternate di bawah kepemimpinan Kaitjili Sebori berhasil menguasai Gorontalo dan Limboto. Di bawah kekuasaan ternate, pemerintahan diatur menurut cara Ternate. Raja dibantu Jogugu dan Jogugu dibantu Wulea Lo Lipu dengan sebutan Marsaoleh. Kepala kampung disebut Kimalaha dan Panglima armada laut disebut Kapten Laut (Aptilao)

Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960 berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Pulau Sulawesi, yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. Tepat tanggal 16 Februari 2001, Kota Gorontalo resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2000 Pasal 7.

Sebelum membahas tentang perkembangan Kota Gorontalo, ada baiknya membahas sekilas sejarah terbentuknya Provinsi Gorontalo, Perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo berdasarkan alasan sejarah, dimana Gorontalo sudah lebih dahulu menyatakan kemerdekaan dan berdaulat sebagai pemerintahan sendiri pada tanggal 23 Januari 1942 melalui perjuangan yang dikenal dengan hari patriotik. Kedaulatan wilayah Gorontalo ini bertahan selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944. Saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara, rakyat Gorontalo tetap menyatakan kesetiaannya kepada Negara Republik Indonesia dengan semboyan “Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja”. Semboyan ini didengungkan pertama kali di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (<http://gorontaloprov.go.id/>).

Semangat hari patriotik 23 Januari 1942, menjadi inspirasi rakyat Gorontalo untuk membentuk Provinsi Gorontalo dan terlepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Atas dasar semangat tersebut, maka pada tanggal 23 Januari tahun 2000, rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo. Wilayah Gorontalo sendiri tergabung ke Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang menyatakan bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Propinsi Sulawesi Utara.

4.1.2 Perkembangan Spasial Kota Gorontalo

Keberadaan Kota Gorontalo pada zaman dahulu dikenal memiliki tiga tempat kedudukan yaitu Hulawa, Duingi (sekarang Tuladenggi) yang keduanya terletak di pinggir sungai Bolango serta tempat ketiga adalah diantara dua kampung Biawao dan Limba B sekarang ini. Kedua kampung inilah merupakan pusat kelahiran Gorontalo yang kemudian dikenal sebagai Kota Gorontalo. Kota Gorontalo secara administratif pada awalnya terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kota Barat, Kota Utara dan Kota Selatan yang tersebar di 45 desa/kelurahan (Tabel 3).

Tabel 3 Luas Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2000

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase
1.	Kota Barat	19,26	29,73
2.	Kota Selatan	28,82	44,48
3.	Kota Utara	16,71	25,79
	Jumlah	64,79	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Tahun 2000

Kecamatan Kota Barat memiliki luas 19,26 ha atau 29,73 % dari luas Kota Gorontalo. Kecamatan Kota Selatan luasnya 28,82 ha (44,48 %) dan Kecamatan Kota Utara luasnya 16,71 ha atau sebesar 25,79 % dari luas Kota Gorontalo. Berkaitan dengan kebijaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dan kebutuhan serta perkembangan wilayah, maka sejak Tahun 2004 terjadi pemekaran 3 kecamatan yaitu pemekaran Kecamatan Kota Barat menjadi Kecamatan Duingi dan Kecamatan Kota Barat, pemekaran Kecamatan Kota Selatan menjadi Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Selatan serta pemekaran Kecamatan Kota Utara menjadi Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Tengah, sehingga saat ini wilayah Kota Gorontalo terbagi dalam 6 kecamatan (Tabel 4) dan 46

Kelurahan (pemekaran Kelurahan Pohe di Kecamatan Kota Selatan menjadi Kelurahan Pohe dan Kelurahan Tanjung Kramat) (RTRW Kota Gorontalo, 2002)

Tabel 4 . Luas Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (ha)	Persentase
1.	Kota Utara	9	12,58	19,42
2.	Kota Tengah	5	4,13	6,37
3.	Kota Timur	11	14,43	22,27
4.	Kota Selatan	10	14,39	22,21
5.	Kota Barat	7	15,16	23,40
6.	Dungingi	4	4,1	6,33
	Jumlah	46	64,79	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Selatan adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar. Ketiga kecamatan ini sebagian besar wilayahnya adalah daerah perbukitan.

Perubahan spasial yang terjadi di Kota Gorontalo disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah. Kondisi sebelum dilakukan pemekaran kecamatan pada tahun 2004, kecamatan Kota Barat dan Kota Selatan yang didominasi dengan perbukitan terjal menyulitkan dalam melakukan koordinasi ke daerah-daerah yang jaraknya jauh. Ditunjang dengan perkembangan daerah yang tidak merata, pemerintah Kota Gorontalo berinisiatif untuk memperpendek rentang koordinasi dan membagi kedua kecamatan ini sesuai dengan kondisi perkembangan daerah.

Kecamatan Kota Barat dibagi menjadi Kecamatan Kota Barat yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan Kecamatan Dungingi yang merupakan daerah yang datar dan lebih maju dalam perkembangannya. Kecamatan Dungingi dengan luas daerah 4,10 ha dan hanya memiliki 4 kelurahan, pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebesar 21. 568 jiwa. Hal ini menunjukkan perkembangan daerah yang tidak seimbang dibandingkan dengan Kecamatan Kota Barat yang memiliki luas jauh lebih besar yaitu 15,6 ha dengan 7 kelurahan, tetapi hanya memiliki penduduk sebanyak 20.220 jiwa.

Kecamatan Kota Selatan sebelum dimekarkan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 28,82 ha atau 44,48 % dari luas wilayah Kota Gorontalo. Di bagian selatan kecamatan ini merupakan wilayah perbukitan yang dipisahkan oleh Sungai Bone. Rentang kendali yang jauh dan medan yang berat ini menyebabkan Kecamatan Kota Selatan ini dimekarkan menjadi Kecamatan Kota Selatan dan

Kecamatan Kota Timur. Pembagian wilayah kecamatan ini mengikuti kondisi wilayah yaitu batas sungai dan memiliki luas serta jumlah penduduk yang hampir merata.

Kecamatan Kota Utara juga dimekarkan untuk mengantisipasi perkembangan yang tidak seimbang antar daerah dan berdasarkan kondisi wilayah. Di bagian selatan dan barat Kota Utara merupakan daerah yang sudah cukup padat sedangkan sisanya adalah daerah pertanian sawah yang masih jarang penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan luas wilayah yang hanya 4,13 ha dengan 5 kelurahan pada tahun 2010, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 27.047 jiwa. Jumlah penduduk ini hampir sama dengan jumlah penduduk Kecamatan Kota Utara yang memiliki luas wilayah sebesar 12,58 ha yaitu sebanyak 33.149 jiwa. Berdasarkan uraian di atas, perkembangan spasial Kota Gorontalo mengikuti kondisi dan perkembangan wilayah tersebut.

Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Selatan dan Kota Timur, tidak terjadi perkembangan yang berarti karena sebagian besar wilayahnya adalah perbukitan. Hanya sebagian kecil wilayahnya yang merupakan dataran rendah. Itupun sudah sangat padat karena merupakan wilayah yang dekat dengan pusat kota.

Di Kecamatan Kota Selatan sudah tidak terjadi lagi perkembangan yang berarti karena memang sudah cukup padat dan hampir tidak ditemukan lagi lahan untuk dikembangkan. Di lain pihak daerah ini sebagian besar wilayahnya merupakan daerah langganan banjir sehingga kurang menarik bagi penduduk yang hanya ingin membeli tanah atau rumah untuk ditinggali. Wilayah ini hanya cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan pertokoan/perdagangan karena terletak di pusat Kota Gorontalo. Pada tahun 2012, terjadi lagi pemekaran kecamatan di Kota Gorontalo menjadi 9 Kecamatan dengan 50 Kelurahan, yaitu;

Tabel 5 Kecamtan Pemekaran di Kota Gorontalo

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (ha)	Persentase
1	Kec. Kota Barat	7	20.22	25.41
2	Kec. Kota Selatan	5	2.83	3.56
3	Kec. Hulonthalangi	5	14.33	18.00
4	Kec. Duingingi	5	4.70	5.91
5	Kec. Kota Timur	6	5.36	6.73
6	Kec. Dumbo Raya	5	14.14	17.77
7	Kec. Kota Utara	6	8.08	10.15
8	Kec. Sipatana	5	5.09	6.40
9	Kec. Kota Tengah	6	4.84	6.08
		50	79.59	100.00

4.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Semenjak terbentuknya Provinsi Gorontalo pada Tahun 2001, jumlah penduduk Kota Gorontalo yang merupakan ibukota provinsi terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 6

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kota Gorontalo

Tahun	Jumlah Penduduk
1990	119.743
1995	121.669
2000	134.931
2005	156.390
2010	170.127
2015	192.898
2020	198.539
2024	203.812

Sumber : Badan Pusat Statistik,

Kota Gorontalo Dalam Angka 2007

Kota Gorontalo Dalam Angka 2010

Kota Gorontalo Dalam Angka 2015

Kota Gorontalo Dalam Angka 2020

Kota Gorontalo Dalam Angka 2025

Dari Tabel 6. diketahui bahwa jumlah penduduk pada tahun 1990 berjumlah 119.743 jiwa dan meningkat menjadi 134.931 jiwa pada tahun 2000. Terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 15.188 jiwa dalam kurun waktu sepuluh tahun (tahun 1990 sampai 2000). Jika dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 170.127 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 35.196 jiwa hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun. Terjadi lonjakan jumlah penduduk dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2010. Dari tahun 1990 ke tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 50.384 jiwa.

Tahun 2015 penduduk Kota Gorontalo berjumlah 192.898 jiwa. Bertambah sebanyak 22.771 jiwa. Jika melihat perkembangan jumlah penduduk tahun 2020 (sebanyak 198.539 jiwa) dan tahun 2024 (sebanyak 203.812 jiwa), dapat dikatakan pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo mulai melambat. Tahun 2015 ke tahun 2020 hanya bertambah 5.641 jiwa. Salah satu penyebabnya adalah Kota Gorontalo sudah mulai jenuh untuk lahan permukiman dan mulai menempati wilayah pinggiran kota.

Perkembangan jumlah penduduk ini baik secara alami maupun akibat terjadinya migrasi. Migrasi terjadi baik berasal dari luar Kota Gorontalo tapi masih dalam lingkup Provinsi Gorontalo maupun dari luar Provinsi Gorontalo. Pertambahan penduduk ini menyebabkan semakin tinggi pula tuntutan akan ruang tempat tinggal. Tuntutan yang tinggi dengan luas lahan yang terbatas, menyebabkan wilayah pinggiran kota mulai dilirik.

Daerah pinggiran kota yang perkembangannya cukup pesat yaitu di daerah Huangobotu dan Tomulabutao di Kecamatan Dungingi serta di daerah Wongkaditi Kecamatan Kota Utara. Semua kompleks perumahan yang baru dibangun ini awalnya adalah areal pertanian. Hal ini tentu saja merupakan perkembangan kota yang negatif karena mengurangi daerah resapan air sehingga bisa meningkatkan potensi banjir Kota Gorontalo.

Selain kebutuhan akan lahan permukiman, dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo pada tahun 2001, berdampak pada kebutuhan lahan untuk membangun kawasan perkantoran tingkat pemerintah provinsi. Hal ini terjadi karena kompleks perkantoran yang ada, merupakan kompleks perkantoran milik pemerintah Kota Gorontalo. Pembangunan kompleks perkantoran pemerintah provinsi ini membutuhkan areal yang lebih luas yang tidak memungkinkan lagi untuk membangunnya di tengah kota. Dampaknya akan terjadi perkembangan ruang kota yang berjalan ke arah pinggiran kota (proses perkembangan spasial sentrifugal).

Selain keterbatasan lahan perkantoran, keterbatasan lahan di tengah kota khususnya untuk membangun pusat-pusat perdagangan juga terjadi. Lahan pusat perdagangan yang sudah ada, tidak bisa lagi untuk dikembangkan. Keterbatasan lahan untuk membangun pusat perdagangan ini berdampak terjadinya perubahan penggunaan lahan. Untuk membangun pusat perdagangan, kurang menguntungkan jika harus dibangun di pinggiran kota. Oleh karena itu, fenomena yang nampak sekarang ini adalah terjadinya perkembangan spasial sentripetal (proses penambahan bangunan-bangunan kota yang terjadi di bagian tengah kota (*the inner parts of the city*)). Perkembangan spasial sentripetal untuk pembangunan pusat perdagangan salah satunya terjadi di Kelurahan Limba U II, dimana terjadi konversi lahan sawah yang berada di tengah kota.

Adanya kebutuhan akan lahan untuk menampung aktivitas perkotaan seperti permukiman, konsentrasi perdagangan, jasa dan pusat pemerintahan mengakibatkan harga lahan perkotaan meningkat sehingga mendorong aglomerasi daerah pinggiran

Kota. Fenomena ini sudah mulai nampak, seperti daerah Telaga terjadi aktivitas perdagangan dan perumahan serta Wongkaditi menjadi kompleks perkantoran dan perumahan. Akibatnya terjadi pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang berupa proses perembetan fisik kekotaan ke arah luar (*urban sprawl*). Proses ini mengakibatkan wilayah pinggiran Kota Gorontalo mengalami proses transformasi spasial seperti densifikasi permukiman dan transformasi sosio-ekonomi. Densifikasi permukiman di wilayah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan ruang di daerah perkotaan (Giyarsih, 2001).

Adanya perkembangan yang terjadi di daerah Wongkaditi dan Telaga menunjukkan daerah pinggiran kota mulai dilirik untuk dijadikan daerah permukiman dan perkantoran baru. Selanjutnya daerah pinggiran kota yang oleh Yunus (2008) diistilahkan dengan Wilayah Peri Urban/WPU. Pakar ini menjelaskan daerah pinggiran kota sebagai suatu daerah yang juga dikenal sebagai daerah *urban fringe* atau daerah *peri-urban* atau nama lain yang muncul kemudian. Daerah tersebut akan berperan penting terhadap peri kehidupan penduduk baik desa maupun kota di masa yang akan datang sehingga memerlukan perhatian yang serius. Hal ini karena daerah ini terletak di antara wilayah yang mempunyai kenampakan kekotaan di satu sisi dan wilayah yang mempunyai kenampakan kedesaan di sisi yang lain. Di daerah antara ini muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari wilayah kota dan desa yang mempunyai dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks.

Bentuk kehidupan kekotaan di masa mendatang sangat ditentukan oleh bentuk, proses dan dampak perkembangan perkotaan yang terjadi di *urban fringe* ini. Segala bentuk perkembangan fisik baru akan terjadi di wilayah ini sehingga menentukan peri kehidupan kekotaan. Oleh karena itu menurut Yunus (2008), wilayah ini perlu perhatian khusus untuk menghindari bentuk dan proses perkembangan fisik kekotaan baru yang mengarah ke dampak negatif.

4.1.3 Prospek Kota Gorontalo

Perkembangan yang terjadi di Kota Gorontalo begitu pesat dalam kurun waktu Tahun 2000 sampai Tahun 2025. Ditandai dengan perkembangan luas kompleks permukiman, perkantoran dan jasa dengan mengalihfungsikan lahan persawahan dan perkebunan yang begitu pesat, Kota Gorontalo ke depan akan berubah dari kota agraris menjadi kota jasa dan perdagangan. Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang dalam selang waktu ini. Industri konstruksi berkembang dengan

pesat untuk mengakomodir permintaan akan permukiman dan kompleks perkantoran serta perdagangan.

Fenomena yang terjadi di lapangan terlihat perumahan-perumahan yang letaknya strategis seperti dekat jalan raya, beralih fungsi menjadi pertokoan baik kecil maupun menengah. Sawah-sawah dikonversi menjadi kompleks perdagangan seperti yang terdapat di Kelurahan Limba U II dengan dibangunnya Gorontalo Bussines Centre (GBC). Kompleks rumah sakit lama (Rumah Sakit Aloe Saboe) dirubah menjadi kompleks perdagangan skala besar. Di kompleks ini telah dibangun Matahari, Hypermart, Studio 21, Hotel dan resotran-restoran skala besar.

Dengan masuknya para investor, di satu pihak terjadi alihfungsi lahan yang cukup besar, di satu pihak membuka lapangan usaha baru untuk penduduk Kota Gorontalo. Disamping itu memberikan pencerahan dan merubah pola pikir masyarakat Gorontalo menjadi lebih terbuka dan meningkatkan etos kerja karena masuknya tenaga kerja terampil dari luar Kota Gorontalo.

Perkembangan ini mengakibatkan Kota Gorontalo tidak bisa lagi menampung aktivitas warganya. Terdapat dua opsi untuk Kota Gorontalo ke depan, yaitu menata wilayah aglomerasi Kota Gorontalo dengan membentuk wilayah fungsional Karena itu perlu dipikirkan opsi memperluas wilayah Kota Gorontalo baik ke arah Telaga Kabupaten Gorontalo maupun ke arah Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Melihat kondisi dan kesiapan masyarakat, Kota Gorontalo lebih baik berkembang ke arah Telaga. Di kawasan ini sudah seperti daerah perkotaan dimana terdapat kompleks pertokoan, pasar dan perkantoran. Masyarakat yang tinggal di daerah Telaga juga sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta yang lebih siap jika terjadi perkembangan Kota Gorontalo.

Pertumbuhan kota yang melebihi wilayah administrasi dapat diatasi dengan perluasan wilayah administrasi atau melalui pendekatan lain seperti perencanaan kota yang matang, pengembangan wilayah pinggiran (suburbanisasi), dan penerapan kebijakan terpadu. Pilihan terbaik tergantung pada konteks spesifik dan tujuan yang ingin dicapai.

Perluasan wilayah administrasi secara resmi menggabungkan wilayah di sekitarnya ke dalam batas administrasi kota yang sudah ada. Kelebihannya memudahkan koordinasi pembangunan, pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum karena semua wilayah berada di bawah satu yurisdiksi. Tantangan yang

dihadapi yaitu dapat memicu konflik dengan wilayah yang ada dan memerlukan proses hukum yang rumit.

Perencanaan tata ruang yang lebih baik seperti perencanaan tata ruang yang matang untuk kota dan wilayah pinggirannya, zonasi yang sesuai, dan pengelolaan transportasi yang lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi. Pengembangan wilayah pinggiran (suburbanisasi) dengan mendorong pembangunan dan pertumbuhan di wilayah pinggiran kota secara terencana, bukan hanya terjadi secara spontan atau tidak terkendali. Ini sering kali menjadi akibat alami dari *urban sprawl*, di mana kota-kota berkembang di luar batas administrasi mereka.

Kebijakan terpadu berupa menerapkan kebijakan yang efektif, seperti revisi peraturan perpajakan untuk mengurangi *sprawl*, mengelola ruang kota dengan lebih profesional, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah sekitar kota untuk mengurangi tekanan ke pusat kota.

Memang perluasan wilayah administrasi sering menjadi solusi yang efektif untuk pertumbuhan kota, tetapi juga perlu dipertimbangkan pendekatan lain yang lebih holistik. Menggabungkan kedua pendekatan, yaitu perluasan wilayah dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang terintegrasi, dapat membantu menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan terkelola dengan baik.

Proses dan prospek perluasan wilayah administrasi:

1. Keterbatasan lahan: Perluasan wilayah dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk, keterbatasan lahan untuk ruang hijau dan perkantoran, serta mengakomodasi investasi yang masuk.
2. Prosedur yang jelas: Prosesnya memerlukan persetujuan bersama antara kota dan kabupaten, persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo, persetujuan gubernur, dan pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemrosesan akhir.
3. Potensi ekonomi: Dalam jangka panjang, perluasan wilayah berpotensi membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi, pajak, serta pengembangan kawasan.
4. Meningkatkan pelayanan: Dapat membantu menata kota menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

4.2 Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan keruangan antara berbagai fenomena di permukaan bumi.

Melalui pendekatan ini, data geografis diolah untuk mengungkap pola, distribusi, serta keterkaitan antar variabel spasial yang berpengaruh terhadap objek penelitian. Lingkup dan proses analisis ini berkaitan dengan analisis terkait tinjauan peraturan tata ruang, perubahan lahan, autokolerasi spasial, dan tipologi wilayah peri urban perkotaan Gorontalo. Beberapa analisis tersebut tertentu yang menampilkan sebaran data secara visual, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika wilayah berdasarkan dimensi spasial.

4.2.1. Tinjauan Kebijakan Tata Ruang

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman di Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menunjukkan adanya upaya sistematis pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan serta mengarahkan pengembangan ruang secara berkelanjutan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2024–2044, Kota Gorontalo yang berstatus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk mengembangkan kawasan permukiman vertikal (Pasal 72 ayat 2). Kebijakan ini mencerminkan strategi untuk mengatasi keterbatasan lahan di pusat kota sekaligus mengefisienkan pemanfaatan ruang. Pengembangan permukiman/hunian vertikal juga menjadi salah satu tantangan perubahan sosial dan budaya bagi masyarakat dari budaya hunian tapak (*landed house*) menjadi hunian vertikal.

Secara lebih rinci, Perwali No. 44 tentang RDTR Kota Gorontalo Tahun 2021-2041 mengarahkan pengembangan kawasan permukiman baru ke bagian utara wilayah kota, terutama di Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana, dan sekitarnya. Peruntukan kawasan permukiman ini bervariasi dari permukiman dengan kepadatan sedang hingga sangat tinggi. Arah kebijakan ini menandakan adanya strategi desentralisasi aktivitas permukiman dari pusat kota menuju kawasan yang masih memiliki potensi pengembangan lahan. Dengan demikian, kawasan utara diharapkan dapat menampung pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada kawasan pusat yang telah padat seperti wilayah bagian barat Kota Gorontalo. Pendekatan spasial semacam ini juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan struktur ruang kota, di mana distribusi fungsi permukiman tidak lagi terkonsentrasi di pusat melainkan menyebar secara proporsional sesuai daya dukung lahan.

Sementara itu, dalam Perda No. 4 tentang RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2013–2033, arah pengembangan kawasan permukiman perkotaan difokuskan pada wilayah

dengan aksesibilitas tinggi dan potensi konektivitas antar kecamatan. Kawasan yang menjadi fokus pengembangan permukiman antara lain Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tilango, Limboto Barat, Limboto, Tibawa, Batudaa, Tabongo, Dungaliyo, dan Boliyohuto. Sebaran arahan ini memperlihatkan pola pengembangan radial dari pusat Kabupaten Gorontalo (Limboto) menuju wilayah sekitarnya. Orientasi pengembangan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengantisipasi pertumbuhan kawasan terbangun di sekitar koridor utama transportasi sekaligus menjaga hubungan fungsional antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Berbeda dengan itu, dalam RTRW Kabupaten Bone Bolango, pengembangan kawasan permukiman diarahkan pada beberapa wilayah strategis yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal dan subkawasan perkotaan, antara lain di Kecamatan Suwawa, Kabila, Tilongkabila, dan Tapa. Selain itu, terdapat perencanaan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di beberapa desa seperti Moutong, Iloheluma, dan Butu di Kecamatan Tilongkabila, Huluduotamo di Kecamatan Suwawa, serta Ayula Selatan dan Ayula Tilango di Kecamatan Bulango Selatan. Rencana ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango memiliki strategi pengembangan kawasan permukiman yang lebih terstruktur dengan menyiapkan kawasan potensial untuk pembangunan perumahan baru yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi antarwilayah.

Secara umum, arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango menunjukkan kecenderungan berkembang ke wilayah pinggiran Kota Gorontalo. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kawasan terbangun di area suburban yang berpotensi menimbulkan fenomena aglomerasi perkotaan. Pertumbuhan permukiman di wilayah pinggiran sering kali menimbulkan masalah baru seperti konversi lahan pertanian produktif, meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar, serta ketimpangan pelayanan publik antara pusat dan pinggiran kota. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga dapat memperluas fungsi ekonomi dan sosial Kota Gorontalo sebagai simpul utama kegiatan wilayah. Dengan demikian, perencanaan tata ruang yang terintegrasi antar kabupaten dan kota menjadi kunci utama dalam mengendalikan pola pertumbuhan tersebut agar tidak mengarah pada urban sprawl, tetapi mendorong terbentuknya sistem perkotaan yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

4.2.2. Analisis Perubahan Lahan

Bagian dari analisis spasial adalah analisis perubahan lahan untuk melihat kondisi lahan dalam kurun waktu tertentu untuk melihat perubahan dan tren penggunaan terhadap lahan tersebut. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi perubahan lahan terhadap lahan secara spasial khususnya pada permukiman dan juga lahan pertanian sawah.

A. Analisis Perubahan Lahan Permukiman

Perubahan lahan permukiman menggambarkan dinamika penggunaan ruang yang terjadi seiring dengan perkembangan aktivitas sosial, ekonomi, dan demografis suatu wilayah. Analisis terhadap perubahan ini penting dilakukan untuk mengetahui arah pertumbuhan permukiman, tingkat konversi lahan non-permukiman, serta dampaknya terhadap struktur dan fungsi kawasan.

Tabel 7. Perubahan Luas Permukiman Tahun 2013-2022

Kecamatan	Luas Permukiman (Ha)		Peningkatan Luas Permukiman (Ha)	Persentase Peningkatan
	2013	2022		
Dumbo Raya	113,20	138,63	25,43	22,47%
Dungingi	209,73	286,26	76,53	36,49%
Hulonthalangi	111,15	136,14	24,99	22,48%
Kota Barat	171,70	246,31	74,61	43,45%
Kota Selatan	248,92	268,82	19,91	8,00%
Kota Tengah	322,41	368,66	46,24	14,34%
Kota Timur	270,40	311,09	40,69	15,05%
Kota Utara	214,52	261,94	47,42	22,10%
Sipatana	207,74	251,81	44,08	21,22%
Kota Gorontalo	1.869,76	2.269,66	399,90	21,39%
Kabila	221,72	307,17	85,45	38,54%
Tilongkabila	187,79	302,09	114,30	60,87%
Suwawa	116,68	193,42	76,74	65,77%
Bulango Selatan	100,48	137,32	36,84	36,67%
Bonepantai	100,02	132,77	32,75	32,74%
Kabila Bone	94,15	127,96	33,81	35,91%
Suwawa Tengah	52,43	98,66	46,23	88,17%
Tapa	69,53	94,83	25,31	36,40%
Bone	66,42	89,01	22,58	34,00%
Bone Raya	64,74	88,95	24,21	37,40%
Bulango Timur	58,88	88,53	29,65	50,37%
Suwawa Timur	35,68	84,43	48,75	136,65%
Botupinge	48,94	83,01	34,07	69,60%
Bulango Utara	41,50	66,11	24,62	59,32%
Suwawa Selatan	22,77	64,43	41,66	182,94%

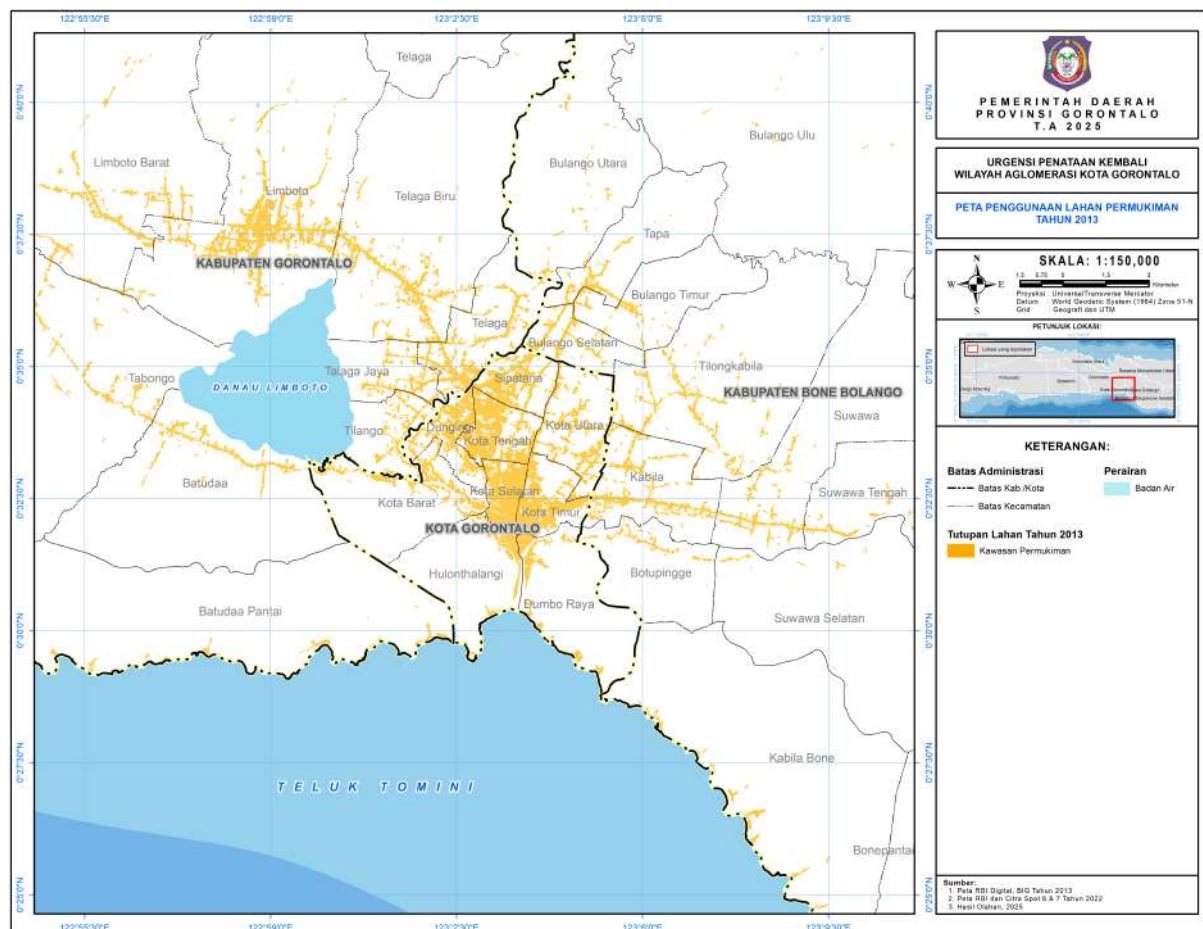
Kecamatan	Luas Permukiman (Ha)		Peningkatan Luas Permukiman (Ha)	Persentase Peningkatan
	2013	2022		
Bulawa	37,95	55,06	17,11	45,08%
Pinogu	45,37	48,07	2,70	5,96%
Bulango Ulu	10,73	30,74	20,01	186,41%
Kabupaten Bone Bolango	1.375,77	2.092,57	716,80	52,10%
Tilango	94,29	172,36	78,07	82,80%
Talaga Jaya	102,57	179,13	76,56	74,64%
Tabongo	119,72	203,26	83,54	69,78%
Telaga Biru	263,97	426,43	162,46	61,54%
Tolangohula	283,72	439,25	155,53	54,82%
Limboto Barat	246,18	380,79	134,61	54,68%
Asparaga	104,92	152,34	47,42	45,20%
Telaga	224,37	316,50	92,13	41,06%
Dungaliyo	142,74	199,94	57,20	40,07%
Biluhu	69,04	94,65	25,60	37,08%
Batudaa	122,44	164,75	42,31	34,55%
Batudaa Pantai	86,26	114,71	28,46	32,99%
Bongomeme	120,46	159,43	38,98	32,36%
Limboto	552,64	716,74	164,10	29,69%
Tibawa	377,07	484,82	107,75	28,58%
Pulubala	153,33	195,39	42,06	27,43%
Bilato	59,89	75,04	15,15	25,29%
Mootilango	158,35	172,72	14,38	9,08%
Boliyohuto	322,57	341,23	18,66	5,79%
Kabupaten Gorontalo	3.604,53	4.989,50	1.384,97	38,42%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

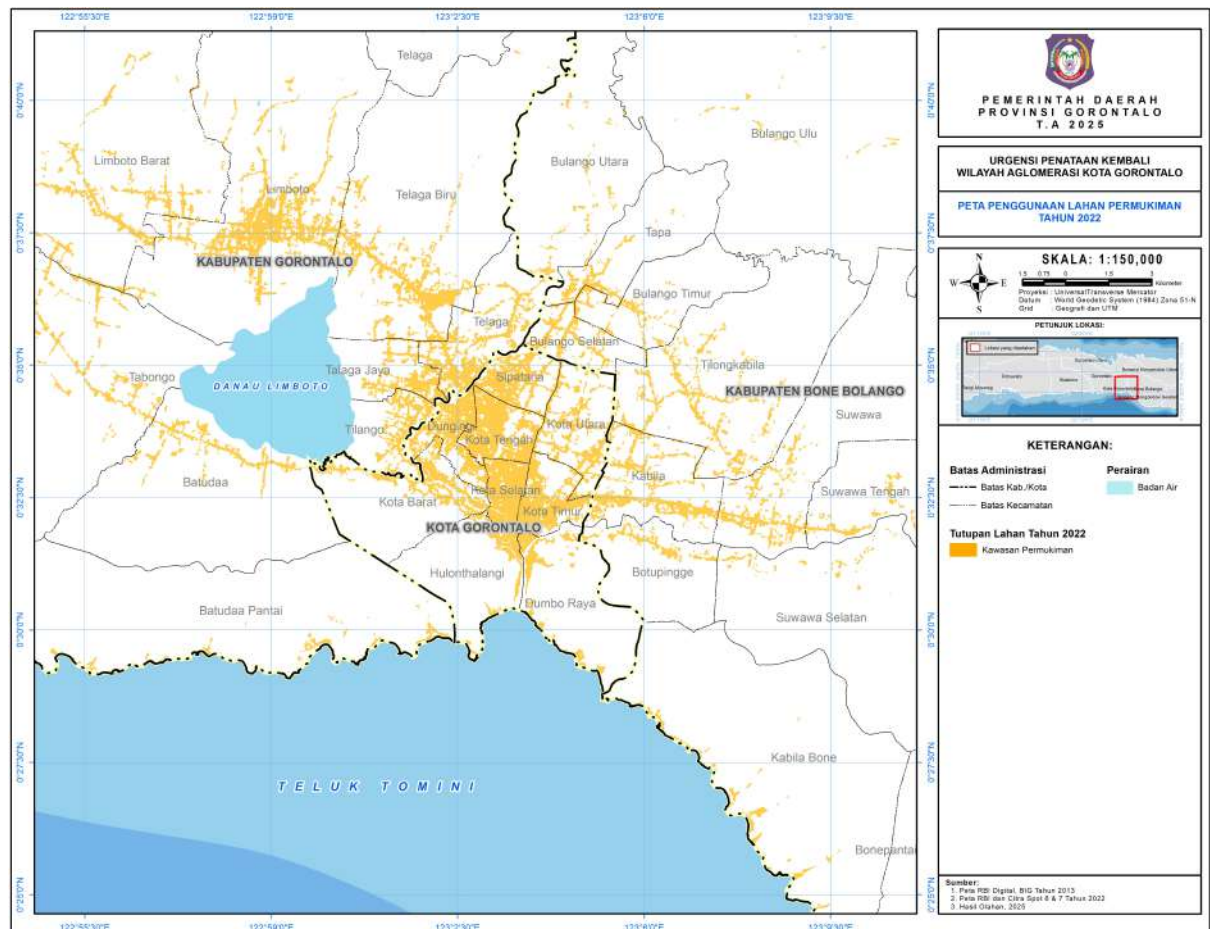
Berdasarkan hasil pengolahan data penggunaan lahan, ketiga wilayah di atas mengalami peningkatan luas permukiman dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Adapun luas permukiman di Kabupaten Bone Bolango **pada tahun 2013-2022** terjadi **penambahan sebesar 716,80 Ha atau 52,10%** dalam kurun waktu sembilan tahun. Untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri, kecamatan dengan penambahan luas permukiman yang lebih besar, di antaranya Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila dengan peningkatan luas permukiman berturut-turut sebesar 85,45 Ha dan 114,30 Ha atau setara dengan pertumbuhan luas permukiman sebesar 38,54% untuk Kecamatan Kabila, dan 60,87% untuk Kecamatan Tilongkabila. Kabupaten Gorontalo **pada tahun 2013-2022** luas tersebut meningkat **1.384,97 Ha atau 38,42%**. Untuk Kabupaten Gorontalo sendiri, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki persentase peningkatan luas permukiman yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, yakni Kecamatan Tilango dan Kecamatan

Telaga Jaya dengan persentase peningkatan luas permukiman berturut-turut sebesar 82,80% dan 74,64%, di mana peningkatan luas permukiman sebesar 78,07 Ha untuk Kecamatan Tilango, dan 76,56 Ha untuk Kecamatan Talaga Jaya. Untuk Kota Gorontalo luas permukiman juga meningkat dengan perkembangan yang cukup masif di bagian barat kota khususnya di Kecamatan Kota Barat dengan pertambahan 74,61 Ha dan Kecamatan Dungi bertambah 76,53 Ha.

Secara garis besar pertumbuhan lahan permukiman terjadi peningkatan, kecenderungan dan pola yang terlihat pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan pertumbuhan lahan permukiman pada radius fungsional Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo menunjukkan perkembangan permukiman ke arah barat kota yang sejalan dengan pertumbuhan kecamatan sekitarnya di Kabupaten Gorontalo seperti Kecamatan Tilango, Telaga Jaya dan Telaga. Potret serupa dialami oleh Kecamatan Tilongkabila dan Botupinge di Kabupaten Bone Bolango yang naik cukup signifikan, disamping itu kecamatan lain yang sudah memiliki permukiman yang cukup besar juga mengalami peningkatan seperti di Kecamatan Kabila dan Bulango Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.



Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Permukiman Tahun 2013



Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan Permukiman Tahun 2022

B. Analisis Perubahan Lahan Sawah

Perubahan lahan pertanian sawah mencerminkan pergeseran fungsi ruang yang sering kali terjadi akibat tekanan berbagai faktor pembangunan. Proses konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian, terutama lahan terbangunan seperti permukiman dan infrastruktur, menjadi indikator penting dalam memahami dinamika pemanfaatan lahan di suatu wilayah. Analisis spasial terhadap perubahan lahan sawah memungkinkan identifikasi pola penyusutan areal pertanian, arah ekspansi penggunaan lahan lain, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya terhadap keberlanjutan sistem pangan dan lingkungan.

Tabel 7. Perubahan Luas Sawah di Wilayah Kajian Tahun 2013-2022

Perubahan Sawah	Luas (Ha)	Persentase
Permukiman	421,95	84,49%
Perkebunan	47,28	9,47%
Tanah Kosong	12,44	2,49%
Tegalan/Ladang	17,74	3,55%
Total	499,41	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 8. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Permukiman Tahun 2013-2022

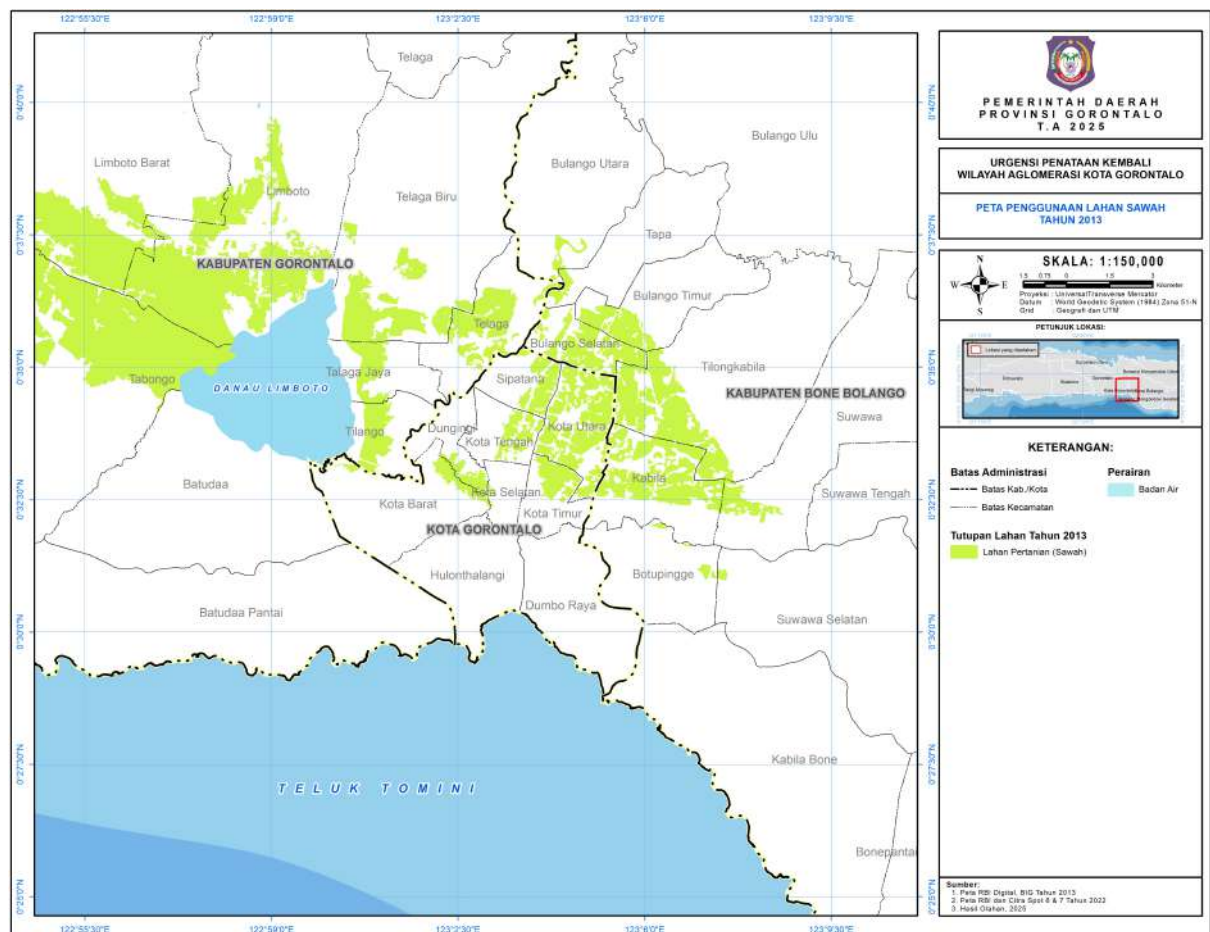
Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
Kabupaten Bone Bolango	68,95	16,34%
Bone Raya	1,73	0,41%
Bulango Selatan	14,93	3,54%
Bulango Timur	5,18	1,23%
Bulango Utara	0,31	0,07%
Kabila	22,83	5,41%
Pinogu	0,41	0,10%
Suwawa	2,46	0,58%
Tapa	3,92	0,93%
Tilongkabila	17,17	4,07%
Kabupaten Gorontalo	230,28	54,57%
Asparaga	4,50	1,07%
Bongomeme	0,07	0,02%
Dungaliyo	11,11	2,63%
Limboto	43,68	10,35%
Limboto Barat	7,58	1,80%
Mootilango	6,77	1,60%
Pulubala	0,06	0,01%
Tabongo	49,56	11,75%
Talaga Jaya	5,78	1,37%
Telaga	21,15	5,01%
Telaga Biru	23,37	5,54%
Tibawa	10,80	2,56%
Tilango	7,05	1,67%
Tolanghula	38,81	9,20%
Kota Gorontalo	122,73	29,09%
Dungingi	18,91	4,48%
Kota Barat	27,49	6,52%
Kota Selatan	5,62	1,33%
Kota Tengah	16,22	3,85%
Kota Timur	13,04	3,09%
Kota Utara	33,30	7,89%
Sipatana	8,15	1,93%
Total	421,95	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

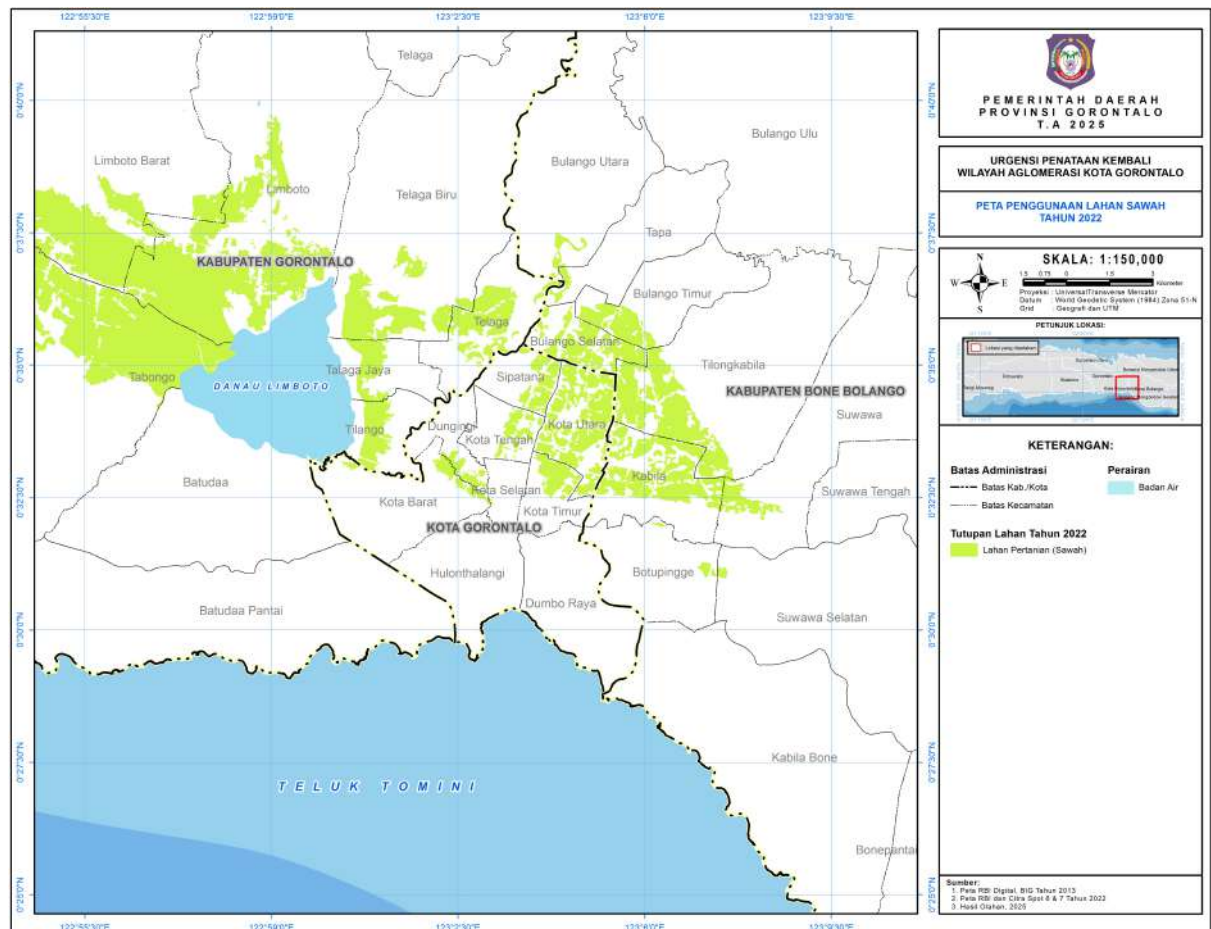
Berdasarkan data perubahan luas sawah antara tahun 2013 dan 2022, terlihat adanya penurunan signifikan luas lahan pertanian di wilayah kajian. Secara keseluruhan, luas sawah berkurang 499,41 Ha. Dimana penurunan lahan sawah tersebut sebagian besar berubah menjadi permukiman (84,49%). Perubahan lahan pertanian

sawah menjadi permukiman. Penurunan terjadi di Kota Gorontalo, yaitu 144,28 Ha (12,87%) dengan Kecamatan Kota Utara memiliki luasan lahan sawah yang berkurang sebesar 33,3 Ha disusul oleh Kecamatan Kota Barat dengan penurunan 27,49 Ha dari total lahan sawahnya. Penurunan luas lahan sawah menjadi permukiman juga terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan perubahan sawah menjadi permukiman terbesar di Kecamatan Kabila yakni 22,83 Ha dan Kecamatan Tilongkabila sebesar 17,17 Ha. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Gorontalo, penurunan paling mencolok di Limboto dan Tabongo dengan penurunan masing-masing 43,68 Ha dan 49,56 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Data ini menunjukkan adanya tren konversi lahan pertanian ke penggunaan lainnya khususnya permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitarnya, yang menandakan tekanan urbanisasi terhadap ketersediaan lahan produktif semakin meningkat.



Gambar 9. Peta Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2013



Gambar 10. Peta Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2022

4.2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung permukiman menjadi fondasi penting dalam memahami kemampuan suatu wilayah menampung perkembangan hunian secara berkelanjutan. Keduanya menggambarkan batas kemampuan lingkungan dan ruang untuk mendukung aktivitas penduduk tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap sumber daya dan kualitas hidup. Ketika jumlah penduduk meningkat dan pola pemanfaatan lahan berubah, kapasitas wilayah untuk menyediakan ruang layak huni, infrastruktur, serta layanan dasar diuji. Pembahasan mengenai daya dukung dan daya tampung permukiman membantu menilai sejauh mana suatu kawasan dapat berkembang, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan permukiman berjalan sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk dan permukiman membentuk hubungan yang saling memengaruhi. Ketika jumlah penduduk bertambah, kebutuhan akan hunian ikut meningkat, sehingga permintaan terhadap lahan permukiman menjadi lebih besar. Perubahan dalam tutupan

lahan serta penggunaan kawasan permukiman untuk fungsi selain hunian dapat mempercepat terjadinya kekurangan lahan yang diperuntukkan bagi permukiman.

Menurut hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024 juga menunjukkan bahwa Kota Gorontalo akan mengalami defisit lahan untuk permukiman pada Tahun 2028. Kondisi per kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan yang akan cepat mengalami defisit lahan permukiman adalah Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi. Sebagian besar kecamatan akan mengalami defisit pada Tahun 2027 – 2028. Kondisi ini jika tidak ditindaklanjuti dari sekarang, maka kondisi defisit akan semakin dipercepat.

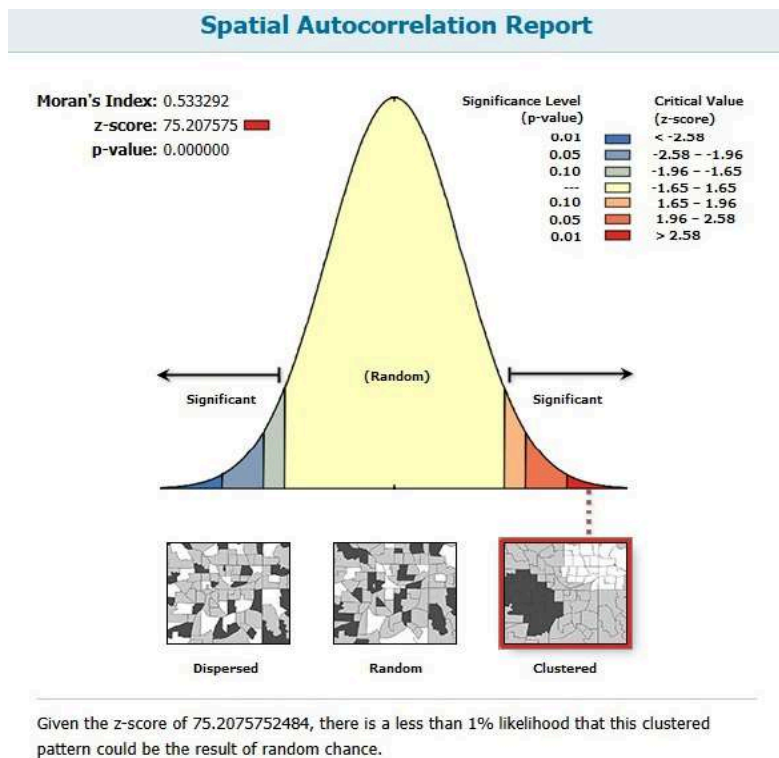
Pengembangan kawasan terbangun juga sering kali mendorong perubahan fungsi lahan, termasuk alih fungsi lahan sawah yang sebelumnya berperan sebagai ruang produksi pangan. Ketika kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, dan aktivitas perkotaan meningkat, tekanan terhadap lahan pertanian pun semakin besar, sehingga area sawah perlahan bergeser menjadi bagian dari struktur ruang terbangun. Pengembangan kawasan perkotaan sendiri perlu memperhatikan juga ruang bagi produksi pangan, dimana untuk Kota Gorontalo memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ada di Kota Gorontalo tersebar pada 3 kecamatan yakni, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana, dan Kecamatan Kota Timur, hal ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan kehilangan fungsi daya dukung strategis bagi wilayah.

4.2.4. Analisis Autokorelasi Spasial

Spatial autocorrelation atau analisis autokorelasi spasial adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu fenomena di ruang (spasial) saling berhubungan dengan fenomena yang berada di lokasi lain di sekitarnya. Dalam kajian ini kami melihat pola distribusi kepadatan penduduk yang terjadi pada wilayah kajian.

A. Autokorelasi Spasial Global

Autokorelasi spasial global adalah analisis yang mengukur sejauh mana keseluruhan wilayah menunjukkan pola spasial tertentu, apakah mengelompok, tersebar, atau acak. Metode yang digunakan adalah menggunakan Indeks Moran (Moran'I).



Gambar 11. Spatial Autocorrelation Moran'I

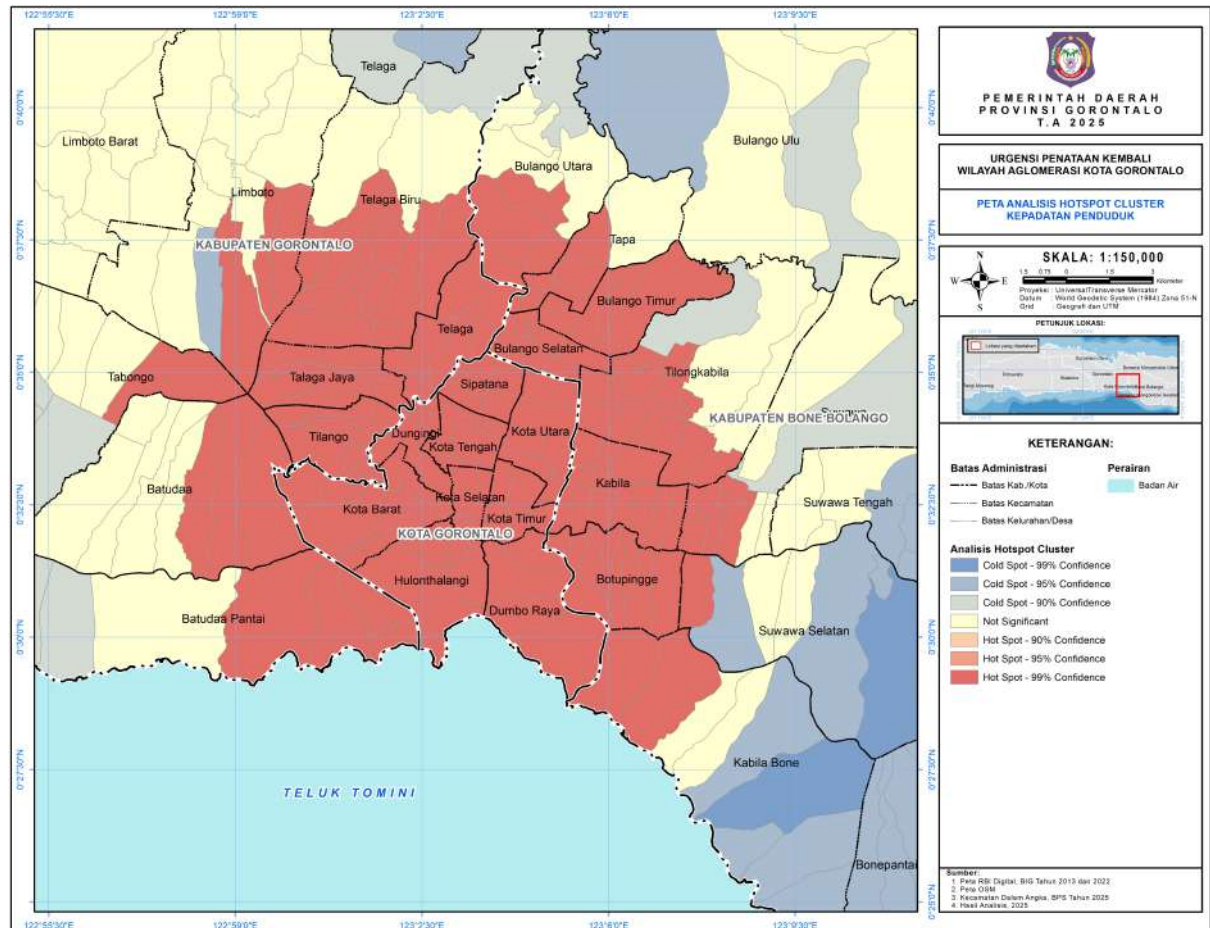
Hasil analisis spasial dengan menggunakan Indeks Moran's I sebesar 0,533292, z-score 75,207575, dan p-value 0,000000 menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang sangat signifikan pada distribusi kepadatan penduduk. Nilai positif Moran's I mengindikasikan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah yang juga memiliki kepadatan tinggi, demikian pula wilayah dengan kepadatan rendah berdekatan dengan wilayah kepadatan rendah. Nilai z-score yang sangat tinggi jauh di atas ambang batas kritis (2,58) memperkuat bahwa pola ini tidak bersifat acak, melainkan menunjukkan pola spasial mengelompok (clustered). Dengan demikian, distribusi kepadatan penduduk di wilayah studi memperlihatkan adanya konsentrasi spasial yang kuat dan signifikan secara statistik.

B. Autokorelasi Spasial Lokal

Autokorelasi spasial lokal adalah analisis yang mengidentifikasi pola keterkaitan spasial pada tingkat lokasi atau area tertentu untuk menemukan daerah yang menjadi *hotspot* atau *coldspot*. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis *hotspot Getis-Ord Gi**.

Hasil analisis autokorelasi spasial lokal dengan *hotspot Getis-Ord Gi** menunjukan pola ter-cluster atau mengelompok pada distribusi kepadatan penduduk di wilayah studi. Pola distribusi mengelompok atau *hotspot* menunjukan konsentrasi besar pada wilayah sekitar Kota Gorontalo seperti, Kecamatan Tilango, Telaga jaya, Telaga,

Bulango Selatan, Kabila, dan Botupingge yang secara langsung berbatasan secara administrasi dengan Kota Gorontalo. Secara jelas dan lengkap dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Peta Analisis Autokorelasi Spasial Hotspot Getis-Ord Gi*

4.2.5. Analisis Tipologi Wilayah Peri Urban

Analisis tipologi wilayah peri-urban atau kawasan pinggiran kota merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakteristik suatu wilayah transisi antara kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk memahami dinamika perubahan ruang yang terjadi akibat ekspansi kota (*urban sprawl*) yang mendorong pergeseran fungsi dan struktur wilayah dari agraris menuju nonagraris (Yunus, 2008; McGee, 1991). Secara metodologis, analisis tipologi dilakukan melalui teknik deskriptif kuantitatif, metode skoring, dan analisis spasial overlay guna memperoleh klasifikasi wilayah ke dalam kategori peri-urban primer, peri-urban sekunder, dan rural peri-urban (Singh, 2011; Alfianto, 2019; Nadeak, 2024; Khoirul, 2025). Tipologi ini mencerminkan tingkat dominasi unsur kekotaan dan kedesaan yang

terbentuk dari perubahan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, serta fasilitas. Dengan demikian, analisis tipologi wilayah peri-urban berperan penting dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan berkelanjutan karena mampu mengungkap pola transformasi spasial yang terjadi di kawasan pinggiran kota sebagai akibat langsung dari pertumbuhan dan intervensi fungsi perkotaan.

Dalam analisis tipologi pada kawasan pinggiran (*peri urban*) Kota Gorontalo kami mengambil lokus pada Desa yang secara langsung berbatasan secara administratif dengan Kota Gorontalo. Dimana terdapat 28 Desa baik dari Kabupaten Gorontalo (12 Desa) dan Kabupaten Bone Bolango (16 Desa). Pemilihan lokasi penelitian pada kawasan pinggiran kota didasarkan pada kenyataan bahwa wilayah peri-urban merupakan zona transisi yang paling dinamis akibat pengaruh langsung ekspansi aktivitas perkotaan. Pada wilayah pinggiran kota penting dilakukan untuk memahami arah perkembangan kota sekaligus merumuskan strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Hasil analisis tipologi kawasan peri urban dengan variabel variabel penggunaan lahan, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan sebaran sarana menunjukkan setidaknya terdapat 5 desa yang masuk kategori Peri Urban Perimer (PUP) yakni di Kabupaten Gorontalo yakni Desa Luwoo, Desa Tilote dan Desa Bulila serta di Kabupaten Bone Bolango ada Desa Pauwo dan Toto Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 9. Hasil Skoring Klasifikasi Wilayah Peri Urban Kota Gorontalo

No.	Nama Desa	Lahan Terbangun	Kepadatan Penduduk	LPP	Sarana Pendidikan			Sarana Kesehatan (Puskesmas)	Skor	Kategori
					SD	SMP	SMA			
1	Iluta	1	1	1	1	2	2	2	10	RPU
2	Bongo	1	2	2	3	3	3	2	16	PUP
3	Kayubulan	1	1	1	3	3	3	3	15	PUP
4	Buhudaa	1	1	1	3	2	2	2	12	PUP
5	Lopo	1	1	1	3	3	3	2	14	PUP
6	Buata	1	1	1	3	2	2	2	12	PUP
7	Tanah Putih	1	1	2	2	2	2	2	12	PUP
8	Sejahtera	1	1	1	3	3	2	2	13	PUP
9	Ayula Tilango	1	2	1	2	2	2	2	12	PUP
10	Huntu Selatan	1	1	1	3	2	3	2	13	PUP
11	Lamahu	1	1	3	2	2	2	2	13	PUP
12	Toto Selatan	2	2	3	3	2	3	2	17	PUR
13	Talango	2	2	3	2	2	3	2	16	PUP

Klasifikasi wilayah peri-urban dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu Peri-Urban Primer, Peri-Urban Sekunder, dan Rural Peri-Urban, yang masing-masing menggambarkan tingkat dominasi ciri kekotaan dan kedesaan dalam suatu wilayah. Hasil dari analisis ini menunjukkan sebaran kawasan perkotaan Gorontalo saat ini mengarah pada bagian barat dan timur yang tercermin dari ke 5 desa yang termasuk dalam wilayah peri urban primer. Sementara wilayah lainnya cenderung akan berkembang dengan sebagian besar wilayah pinggiran Kota Gorontalo masuk kategori wilayah peri urban sekunder dimana zona ini umumnya menjadi daerah pertumbuhan baru yang mengalami konversi lahan secara bertahap. Terdapat juga daerah yang masuk kategori rural peri urban yang meskipun mulai terpengaruh oleh aktivitas kota, wilayah ini masih mempertahankan fungsi dan struktur sosial ekonomi agraris.

Perkembangan dalam kurun waktu terakhir mengarah ke wilayah barat dan timur wilayah perkotaan Gorontalo, hal tersebut tergambar pada hasil analisis diatas. Dengan daya tampung lahan yang akan semakin menurun, kedepan pengembangan akan mengarah ke wilayah utara kota menyebabkan kawasan aglomerasi semakin meningkat, dengan tipe peri urban sekunder perlahan akan berubah menjadi peri urba primer semakin menunjukkan aktivitas perkotaan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kebijakan perkembangan kawasan perkotaan dapat di kendalikan untuk mencapai penggunaan ruang yang efisien, efektif, dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, lingkungan, dan sosial demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.3 Kajian Proyeksi dan Prediksi Tren Perkembangan Kota Gorontalo

4.3.1 Peran Struktur Ekonomi terhadap Urbanisasi di Wilayah Aglomerasi Kota Gorontalo

A. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sekunder (M) terhadap Urbanisasi (U)

Dependent Variable: U
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.15180	0.301486	40.30630	0.0000
A	-10.97541	0.497757	-22.04972	0.0000
M	3.500360	1.721316	2.033537	0.0542

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat urbanisasi. Nilai koefisien sebesar $-10,97$ menandakan bahwa ketika kontribusi sektor pertanian meningkat, tingkat urbanisasi justru menurun. Artinya, kegiatan ekonomi yang masih dominan di sektor pertanian membuat masyarakat cenderung bertahan di desa dan tidak berpindah ke kawasan perkotaan.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Komei Sasaki (1997) yang menyebut bahwa pada tahap awal pembangunan, kegiatan pertanian belum menjadi pendorong utama urbanisasi karena sifatnya yang menyebar dan berorientasi lahan. Di daerah seperti Gorontalo, sektor ini banyak menyerap tenaga kerja di pedesaan, sehingga mobilitas menuju kota masih terbatas.

Sementara itu, sektor sekunder (industri dan pengolahan) menunjukkan pengaruh positif terhadap urbanisasi, dengan nilai koefisien $+3,50$. Meskipun tingkat signifikansinya masih kecil di atas batas statistik ($p \approx 0,05$), arah hubungan ini sudah menggambarkan gejala penting: ketika kegiatan industri tumbuh, penduduk mulai tertarik berpindah ke kota karena tersedia lapangan kerja yang lebih beragam dan pendapatan yang relatif lebih tinggi.

Dari sisi sosial-ekonomi, pola ini memperlihatkan transisi klasik dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai menjadi magnet yang menarik arus migrasi dari desa ke kota, sementara pertanian perlahan kehilangan peran utamanya dalam menyerap tenaga kerja. Hasil ini dapat diartikan bahwa wilayah aglomerasi Gorontalo sedang memasuki fase awal industrialisasi perkotaan, di mana urbanisasi meningkat seiring dengan bertumbuhnya kegiatan industri dan jasa pendukungnya.

B. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Tersier (S) terhadap Urbanisasi (U)

Dependent Variable: U
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.65216	1.421254	11.01292	0.0000
A	-14.47577	2.051813	-7.055113	0.0000
S	-3.500360	1.721316	-2.033537	0.0542

Model kedua memperlihatkan bahwa sektor primer (A) tetap berpengaruh negatif kuat terhadap urbanisasi, dengan nilai koefisien $-14,47$ dan tingkat signifikansi yang sangat tinggi ($p < 0,001$). Ini menegaskan bahwa semakin besar peran sektor pertanian, semakin rendah kecenderungan masyarakat untuk hidup di wilayah perkotaan. Dalam konteks Gorontalo, hal ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak kegiatan ekonomi masih bergantung pada hasil bumi, sehingga daya dorong menuju kota relatif terbatas.

Menariknya, sektor tersier (S) — yang mencakup jasa, perdagangan, dan pelayanan — juga menunjukkan nilai negatif ($-3,50$) meskipun hanya mendekati signifikan. Secara teoritis, sektor jasa sering kali dianggap mendorong urbanisasi karena sebagian besar aktivitasnya berpusat di kota. Namun, dalam kasus Gorontalo, hasil ini menandakan bahwa pertumbuhan sektor jasa belum cukup kuat untuk menciptakan efek penarik ke kota.

Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan hal ini. Pertama, sebagian besar jasa di Gorontalo masih berskala kecil dan tersebar (misalnya perdagangan lokal, jasa perorangan, atau transportasi sederhana) sehingga belum memunculkan *daya tarik perkotaan* yang kuat. Kedua, belum semua kegiatan jasa tersebut terhubung dengan sektor industri atau teknologi modern. Dengan kata lain, jasa yang tumbuh di wilayah ini belum sepenuhnya menjadi “jasa perkotaan”, melainkan masih berbasis pada kebutuhan lokal di pedesaan dan pasar tradisional.

Secara umum, model kedua menunjukkan bahwa pergeseran dari pertanian ke jasa belum sepenuhnya mampu mendorong urbanisasi yang kuat, terutama bila jasa tersebut tidak berbasis produktivitas tinggi. Dalam pandangan Sasaki, kondisi ini menandakan bahwa Gorontalo masih berada pada tahap awal transformasi ekonomi, di mana sektor jasa belum menjadi mesin utama perubahan ruang dan kependudukan.

C. Model Pengaruh Sektor Sekunder dan Tersier (M + S) terhadap Urbanisasi (U)

Dependent Variable: U
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.377324	0.403449	5.892502	0.0000
M+S	10.38517	0.431049	24.09277	0.0000

Model ketiga memberikan gambaran paling jelas tentang arah perkembangan wilayah aglomerasi. Kombinasi sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa)

menunjukkan pengaruh positif yang sangat kuat terhadap tingkat urbanisasi, dengan nilai koefisien +10,38 dan tingkat signifikansi yang sangat tinggi ($p < 0,001$). Nilai $R^2 = 0,9619$ menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi urbanisasi dapat dijelaskan oleh gabungan dua sektor ini.

Secara sederhana, hasil ini berarti bahwa ketika industri dan jasa tumbuh bersama, arus perpindahan penduduk menuju kota meningkat dengan pesat. Masyarakat melihat peluang kerja, usaha, dan peningkatan pendapatan yang lebih besar di kota dibanding di desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah aglomerasi Gorontalo telah memasuki fase industrial-service transformation, yaitu tahap di mana aktivitas ekonomi modern menjadi penggerak utama pertumbuhan penduduk kota.

Menurut logika Komei Sasaki, kondisi seperti ini menandakan terjadinya *agglomeration economy*, yaitu manfaat ekonomi yang timbul karena kegiatan industri dan jasa saling berdekatan secara geografis. Ketika industri berkembang di pusat kota dan jasa tumbuh untuk mendukungnya (transportasi, keuangan, logistik, pendidikan, dan sebagainya), maka efisiensi ekonomi meningkat, dan urbanisasi berkembang secara alami.

Namun, Sasaki juga menekankan bahwa jika konsentrasi ini tidak diimbangi dengan perencanaan wilayah yang baik, maka dalam jangka panjang dapat muncul masalah *agglomeration diseconomy* seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan kesenjangan wilayah antara pusat dan pinggiran. Oleh karena itu, hasil positif ini seharusnya dibaca bukan hanya sebagai tanda kemajuan, tetapi juga sebagai sinyal penting untuk mengatur kembali hubungan antara Kota Gorontalo dan daerah sekitarnya (Telaga, Limboto, Tilango, Tibawa) agar pertumbuhan tidak menumpuk di satu titik saja.

D. Perbandingan Antar Model dan Implikasi Kebijakan

Ketiga model di atas memberikan gambaran evolusi ekonomi yang sangat penting untuk wilayah aglomerasi Gorontalo:

Tabel 10 Perbandingan Antar Model

Model	Kombinasi Sektor	Arah Hubungan terhadap Urbanisasi	Makna Utama
1	A dan M	A (–), M (+)	Pertanian menghambat urbanisasi, industri mulai menarik tenaga kerja ke kota.
2	A dan S	A (–), S (–)	Pertanian masih dominan, sektor jasa belum menjadi motor urbanisasi.
3	M + S	(+) kuat	Industri dan jasa yang tumbuh bersama menjadi pendorong utama urbanisasi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa arah pembangunan wilayah Gorontalo sedang bergerak dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi perkotaan berbasis industri dan jasa. Sektor primer tetap penting sebagai penyedia bahan baku dan lapangan kerja di pedesaan, tetapi perannya terhadap pertumbuhan kota sudah mulai menurun.

Sementara itu, perpaduan sektor industri dan jasa menciptakan *efek ganda* — industri membuka lapangan kerja baru, sedangkan jasa memperkuat kegiatan ekonomi kota melalui perdagangan, transportasi, pendidikan, dan layanan publik.

Bagi pemerintah daerah, temuan ini mengandung pesan strategis:

- Urbanisasi di Gorontalo bukan semata hasil dari pertumbuhan penduduk, tetapi merupakan cerminan perubahan struktur ekonomi.
- Untuk mempercepat pembangunan wilayah secara seimbang, perlu ada sinergi antara kota dan hinterland, misalnya dengan mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah di kecamatan sekitar Kota Gorontalo.
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar harus diarahkan agar *agglomeration economy* bisa menyebar, bukan hanya terkonsentrasi di pusat kota.

Dengan demikian, hasil regresi ini memperlihatkan dasar empiris yang kuat bahwa penataan kembali wilayah aglomerasi adalah langkah penting untuk mengarahkan pertumbuhan yang kini didorong oleh sektor industri dan jasa, agar tetap efisien, merata, dan berkelanjutan.

4.3.2 Peran Struktur Ekonomi terhadap PDRB/Kapita di Wilayah Aglomerasi Kota Gorontalo

A. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sektor Sekunder (M)

Dependent Variable: PCH(YPK)

Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.36401	1.783179	7.494486	0.0000
A	-34.19019	2.944050	-11.61332	0.0000
M	-6.184601	10.18094	-0.607468	0.5498

Hasil analisis menunjukkan bahwa **sektor primer** (pertanian, kehutanan, dan perikanan) berpengaruh **negatif kuat** terhadap tingkat PDRB per kapita. Nilai koefisien

–34,19 dengan tingkat signifikansi tinggi ($p < 0,001$) berarti semakin besar ketergantungan wilayah pada kegiatan pertanian, semakin rendah rata-rata pendapatan masyarakat.

Hal ini mudah dipahami: kegiatan pertanian cenderung menghasilkan nilai tambah yang kecil, bergantung pada lahan, cuaca, dan harga komoditas yang fluktuatif.

Sementara itu, **sektor sekunder** (industri pengolahan) juga menunjukkan arah negatif (–6,18) tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya, sektor industri di wilayah Gorontalo **belum mampu** secara konsisten meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat. Besar kemungkinan karena industri yang berkembang masih berskala kecil—misalnya industri rumah tangga atau pengolahan sederhana—yang belum memberi efek luas terhadap produktivitas.

Hasil ini menggambarkan **tahap awal transformasi struktural**, di mana ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan sektor industri baru tumbuh secara terbatas. Wilayah seperti ini biasanya memiliki urbanisasi yang lambat dan ketimpangan produktivitas antara kota dan desa masih tinggi.

B. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sektor Tersier (S)

Dependent Variable: LOG(YPK)

Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.179410	8.406187	0.854063	0.4023
A	-28.00559	12.13571	-2.307700	0.0308
S	6.184601	10.18094	0.607468	0.5498

Polanya serupa: sektor primer (A) tetap berpengaruh negatif kuat terhadap PDRB per kapita, menandakan bahwa dominasi kegiatan pertanian menekan pertumbuhan pendapatan. Sektor ini masih menjadi penyumbang besar terhadap lapangan kerja, tetapi dengan produktivitas yang rendah. Koefisien –28,01 menunjukkan bahwa ketika proporsi sektor primer meningkat, pertumbuhan pendapatan per kapita justru menurun. Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi Gorontalo yang masih agraris, di mana sebagian besar aktivitas pertanian bersifat subsisten dan belum mengalami transformasi teknologi maupun nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, ketergantungan tinggi pada sektor primer menjadi faktor penghambat utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sektor tersier (S), yang mencakup perdagangan, jasa, transportasi, dan layanan publik, menunjukkan koefisien +6,18 dengan arah hubungan positif namun belum signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor jasa di Gorontalo memang mulai terjadi, tetapi belum cukup kuat untuk memberikan dampak nyata terhadap pendapatan per kapita. Sebagian besar jasa yang tumbuh masih bersifat tradisional, seperti perdagangan kecil, ojek, transportasi lokal, serta layanan rumah tangga, yang menghasilkan nilai tambah rendah. Fenomena ini disebut *dispersed service activity*—yakni pertumbuhan jasa yang tersebar di berbagai titik tanpa integrasi dengan pusat industri dan kegiatan produktif utama. Akibatnya, aktivitas jasa memang tampak meningkat secara kuantitatif, tetapi belum menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang berarti bagi masyarakat secara luas.

C. Model: Pengaruh Gabungan Sektor Sekunder dan Tersier

Dependent Variable: PCH(YPK)

Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.94806	2.207629	-10.39489	0.0000
M+S	35.23306	2.358654	14.93779	0.0000

Model ketiga memperlihatkan gambaran yang sangat berbeda. Koefisien gabungan ($M + S = +35,23$) menunjukkan **pengaruh positif sangat kuat dan signifikan** terhadap PDRB per kapita ($p < 0,001$). Nilai $R^2 = 0,9066$ berarti lebih dari 90 % variasi pendapatan masyarakat dapat dijelaskan oleh pertumbuhan dua sektor ini. Artinya, ketika industri dan jasa tumbuh bersama, rata-rata pendapatan masyarakat meningkat dengan cepat. Industri menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah baru, sementara sektor jasa memberikan dukungan logistik, perdagangan, pendidikan, keuangan, serta transportasi. **Kombinasi** keduanya membentuk apa yang oleh Sasaki disebut **agglomeration economy** — keuntungan ekonomi karena kegiatan industri dan jasa saling berdekatan dan saling mendukung di wilayah perkotaan.

Di Kota Gorontalo, hasil ini menandakan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita tidak lagi bergantung pada pertanian, **tetapi** mulai digerakkan oleh aktivitas industri dan jasa yang terpusat di kawasan perkotaan. Ini juga menjelaskan mengapa wilayah inti kota tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah penyangga (Telaga, Limboto, Tilango, Tibawa): karena di situlah interaksi antara industri dan jasa berlangsung paling intensif.

Dalam jangka panjang, situasi seperti ini menandai **tahap kedua dari transformasi ekonomi**, di mana efisiensi meningkat karena konsentrasi aktivitas di satu pusat pertumbuhan. Namun, tanpa penataan ruang dan pemerataan investasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan *ketimpangan spasial* — pusat semakin kaya, pinggiran tertinggal.

D. Perbandingan Antar Model dan Implikasi Kebijakan Daerah

Tabel 11. Perbandingan Antar Model

Model	Kombinasi Sektor	Arah Hubungan terhadap PDRB per Kapita	Makna Ekonomi
(a)	A & M	A (-) signifikan, M (-) tidak signifikan	Ketergantungan pertanian masih menekan pendapatan; industri belum tumbuh kuat.
(b)	A & S	A (-) signifikan, S (+) tidak signifikan	Jasa yang tumbuh masih berskala kecil, belum memberi nilai tambah besar.
(c)	M + S	(+) kuat dan signifikan	Industri dan jasa yang berkembang bersama menjadi penggerak utama peningkatan pendapatan.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa struktur ekonomi wilayah Gorontalo sedang mengalami transisi dari sistem agraris menuju sistem ekonomi perkotaan berbasis industri dan jasa. Proses ini menunjukkan terjadinya *structural transformation*, di mana peran sektor primer perlahan menurun dan digantikan oleh kegiatan ekonomi dengan produktivitas lebih tinggi. Pergeseran ini mencerminkan pola umum yang dijelaskan dalam teori *urban concentration*, bahwa peningkatan produktivitas wilayah perkotaan terjadi ketika aktivitas ekonomi mulai terkonsentrasi pada sektor-sektor modern seperti manufaktur dan jasa.

Implikasinya bagi kebijakan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mengurangi ketergantungan pada sektor primer.** Pemerintah perlu memodernisasi (intensifikasi) kegiatan pertanian agar produktivitas meningkat, sambil mempercepat pertumbuhan sektor industri dan jasa sebagai pendorong utama ekonomi regional.
2. **Mendorong integrasi kota–hinterland.** Aktivitas industri dan jasa sebaiknya tidak hanya berpusat di inti Kota Gorontalo, tetapi juga diperluas ke kawasan

sekitar seperti Telaga, Limboto, dan Bone Bolango agar efek pertumbuhan lebih merata.

3. **Memperkuat infrastruktur ekonomi.** Akses transportasi, listrik, air bersih, dan jaringan digital menjadi kunci untuk memperluas efek aglomerasi ekonomi (*agglomeration economy*) dan mendorong efisiensi wilayah.
4. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.** Pertumbuhan sektor modern hanya dapat berkelanjutan jika tenaga kerja memiliki keterampilan industri, manajerial, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern.

Dengan demikian, apabila sektor industri dan jasa dapat diperkuat secara terpadu serta dihubungkan secara fungsional dengan wilayah hinterland, maka peningkatan PDRB per kapita di Gorontalo dapat berlangsung lebih cepat, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan.

4.3.3 Peran Sektoral terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kota Gorontalo

A. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sektor Sekunder (M) terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja

Dependent Variable: PCH(L)
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.60608	0.377102	36.08060	0.0000
A	-18.23387	0.622600	-29.28663	0.0000
M	-6.545599	2.153041	-3.040165	0.0060

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) memiliki **pengaruh negatif yang sangat kuat dan signifikan** terhadap pertumbuhan tenaga kerja di Kota Gorontalo, dengan nilai koefisien **-18,23** dan tingkat signifikansi **$p < 0,001$** .

Artinya, semakin besar porsi kegiatan ekonomi yang berasal dari sektor pertanian, semakin kecil laju pertumbuhan tenaga kerja secara keseluruhan di wilayah perkotaan. Hal ini menggambarkan karakter umum wilayah yang masih bergantung pada pertanian, di mana kesempatan kerja bersifat terbatas dan tersebar di pedesaan. Kondisi seperti ini disebut *agricultural retardation effect*, yaitu situasi ketika dominasi sektor pertanian menahan pertumbuhan lapangan kerja modern karena produktivitasnya rendah dan tidak menciptakan rantai ekonomi baru di kota.

Sektor sekunder (industri pengolahan) juga berpengaruh **negatif signifikan** terhadap pertumbuhan tenaga kerja, dengan koefisien **-6,55 (p = 0,006)**. Hasil ini tampak bertentangan dengan teori umum yang menyebut bahwa industri seharusnya menciptakan lapangan kerja. Namun, dalam konteks Gorontalo, angka negatif ini dapat dijelaskan secara rasional: industri yang berkembang di wilayah ini masih relatif kecil, padat modal, dan belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan kata lain, pertumbuhan output industri belum diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja yang sepadan.

Secara keseluruhan, kombinasi dua sektor ini menunjukkan bahwa ekonomi Gorontalo masih berada pada **tahap awal transformasi struktural**, di mana peralihan dari pertanian ke industri belum menciptakan efek tenaga kerja yang signifikan. Proses industrialisasi masih bersifat terbatas dan belum menciptakan *multiplier effect* yang kuat terhadap lapangan kerja perkotaan.

B. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sektor Tersier (S) terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja

Dependent Variable: PCH(L)
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.060479	1.777720	3.971649	0.0006
A	-11.68827	2.566430	-4.554290	0.0002
S	6.545599	2.153041	3.040165	0.0060

Model kedua menunjukkan pola yang lebih dinamis. Sektor primer (A) tetap berpengaruh **negatif signifikan** terhadap tenaga kerja, dengan koefisien **-11,69 (p < 0,001)**, menandakan bahwa dominasi kegiatan pertanian masih menjadi penghambat perluasan lapangan kerja modern.

Sebaliknya, sektor tersier (S) menunjukkan **pengaruh positif signifikan** terhadap pertumbuhan tenaga kerja, dengan koefisien **+6,55 (p = 0,006)**. Ini berarti ketika sektor jasa tumbuh, lapangan kerja di Kota Gorontalo juga meningkat. Sektor jasa di sini mencakup perdagangan, transportasi, keuangan, pendidikan, dan layanan sosial—semuanya memiliki karakteristik padat karya dan berlokasi di wilayah perkotaan.

Hasil ini mencerminkan pergeseran dari *land-based employment* menuju *urban-based employment*. Ketika pertanian menurun, masyarakat mencari sumber penghasilan

baru di sektor jasa, baik formal maupun informal. Pertumbuhan jasa menjadi penanda bahwa Gorontalo mulai mengalami *urban employment transition*, yaitu peralihan tenaga kerja dari desa ke kota karena meningkatnya kebutuhan layanan di pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, sektor tersier mulai berperan sebagai **penyerap tenaga kerja dominan**, terutama bagi masyarakat yang bermigrasi dari pedesaan di sekitar kota. Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana jasa-jasa lokal tumbuh untuk melayani kegiatan ekonomi yang semakin beragam di wilayah aglomerasi.

C. Model Pengaruh Gabungan Sektor Sekunder dan Tersier (M+S) terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja

Dependent Variable: PCH(L)
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.873524	0.551748	-12.45773	0.0000
M+S	19.33762	0.589493	32.80382	0.0000

Model ketiga memberikan hasil yang paling kuat dan positif. Gabungan antara sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) menunjukkan **pengaruh positif signifikan** terhadap pertumbuhan tenaga kerja, dengan koefisien **+19,34 ($p < 0,001$)** dan nilai R^2 yang tinggi (**0,9791**). Artinya, hampir seluruh variasi pertumbuhan tenaga kerja di wilayah ini dapat dijelaskan oleh kombinasi perkembangan dua sektor tersebut.

Kondisi ini disebut *agglomeration employment effect*—yakni, situasi di mana konsentrasi kegiatan industri dan jasa di kota menciptakan peluang kerja baru secara berantai. Ketika industri tumbuh, maka permintaan jasa transportasi, perdagangan, logistik, dan perbankan juga meningkat. Interaksi ini menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, industri menjadi sumber aktivitas ekonomi, dan jasa menjadi penggerak utama penyebaran manfaatnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah aglomerasi Gorontalo telah memasuki fase **industrial–service integration**, yaitu tahap di mana kegiatan industri dan jasa saling memperkuat dan bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di wilayah perkotaan.

Namun perlu menegaskan bahwa fase ini perlu diimbangi dengan kebijakan penataan ruang dan pemerataan kegiatan ekonomi. Tanpa pengelolaan yang baik, efek aglomerasi bisa berbalik menjadi *urban concentration problem*—di mana pekerjaan,

pendapatan, dan fasilitas hanya terkonsentrasi di pusat kota, sementara daerah sekitarnya tertinggal.

D. Perbandingan Antar Model dan Implikasi Kebijakan Daerah

Tabel 12 Perbandingan Antar Model terhadap Tenaga Kerja

Model	Kombinasi Sektor	Arah & Signifikansi	Makna Utama terhadap Tenaga Kerja
(a)	A & M	A (-) signifikan, M (-) signifikan	Pertanian dan industri belum menjadi motor penciptaan kerja; produktivitas masih rendah.
(b)	A & S	A (-) signifikan, S (+) signifikan	Jasa mulai menjadi penyerap tenaga kerja utama di perkotaan.
(c)	M + S	(+) signifikan kuat	Integrasi industri-jasa menciptakan efek aglomerasi dan pertumbuhan lapangan kerja yang cepat.

Dari ketiga model tersebut, dapat dilihat bahwa **pergeseran struktur ekonomi dari pertanian menuju industri dan jasa** adalah kunci utama dalam memperluas lapangan kerja di wilayah aglomerasi Kota Gorontalo. Pertanian tetap penting sebagai penyedia bahan baku dan stabilitas pangan, tetapi tidak lagi menjadi sumber utama pertumbuhan kerja.

Implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain:

1. **Mendorong diversifikasi ekonomi wilayah.** Pemerintah daerah perlu memperkuat keterkaitan antara industri dan jasa agar efek penciptaan lapangan kerja lebih luas.
2. **Mengembangkan kawasan industri dan jasa terintegrasi.** Pusat industri dan perdagangan baru di Telaga, Limboto, dan Tibawa dapat menurunkan tekanan penduduk di pusat kota dan memperluas kesempatan kerja di wilayah sekitarnya.
3. **Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.** Pelatihan berbasis industri dan jasa modern perlu diperluas agar tenaga kerja Gorontalo siap mengisi lapangan kerja produktif yang baru.
4. **Memperkuat konektivitas wilayah.** Infrastruktur transportasi, logistik, dan komunikasi menjadi prasyarat agar kegiatan industri dan jasa bisa tumbuh secara sinergis dan saling mendukung.

Dengan strategi seperti ini, wilayah aglomerasi Gorontalo dapat memanfaatkan potensi *agglomeration economy* secara optimal: menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat, dan menyeimbangkan pertumbuhan antara pusat dan daerah penyangga.

4.3.4 Peran Sektor terhadap Serapan Tenaga Kerja di Kota Gorontalo

A. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sektor Sekunder (M) Terhadap Serapan Tenaga Kerja

Dependent Variable: L/POP

Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.410248	0.207356	6.801084	0.0000
A	-2.924561	0.342348	-8.542662	0.0000
M	-4.321751	1.183887	-3.650475	0.0014

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) memiliki **pengaruh negatif yang kuat dan signifikan** terhadap tingkat serapan tenaga kerja (L/POP), dengan koefisien **-2,92 ($p < 0,001$)**. Artinya, semakin besar kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah, semakin kecil proporsi penduduk yang terserap sebagai tenaga kerja produktif di wilayah perkotaan.

Fenomena ini disebut sebagai *agricultural retardation effect* — yaitu kecenderungan sektor pertanian untuk menahan laju penyerapan tenaga kerja modern karena sifatnya yang padat lahan, bergantung pada musim, dan menghasilkan nilai tambah yang relatif kecil. Dengan kata lain, dominasi pertanian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih terikat pada kegiatan subsisten, bukan kegiatan produktif yang mendukung urbanisasi.

Sementara itu, sektor sekunder (industri pengolahan) juga menunjukkan **pengaruh negatif signifikan** terhadap serapan tenaga kerja (koefisien **-4,32; $p = 0,0014$**). Hal ini tampak bertentangan dengan pandangan umum bahwa industri menciptakan lapangan kerja. Namun dalam konteks Kota Gorontalo, hasil ini mencerminkan **karakter awal industrialisasi** yang masih berskala kecil, padat modal, dan belum menyebar secara luas ke lapisan masyarakat. Dengan kapasitas produksi yang terbatas dan keterampilan tenaga kerja yang belum merata, pertumbuhan industri justru belum mampu menyerap banyak tenaga kerja,

bahkan dalam beberapa kasus, menggeser tenaga kerja tradisional tanpa menciptakan peluang baru yang setara.

Fase ini menggambarkan tahap transisi awal dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri, di mana perubahan **struktur ekonomi belum diiringi perubahan struktur tenaga kerja**. Serapan tenaga kerja kota masih rendah, sementara surplus tenaga kerja pedesaan belum seluruhnya terserap di sektor modern.

B. Model Pengaruh Sektor Primer (A) dan Sektor Tersier (S) Terhadap Serapan Tenaga Kerja

Dependent Variable: L/POP
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.911503	0.977510	-2.978489	0.0069
A	1.397190	1.411197	0.990075	0.3329
S	4.321751	1.183887	3.650475	0.0014

Hasil model kedua menunjukkan arah hubungan yang berbeda. Sektor primer (A) dalam model ini memiliki koefisien positif (**+1,39**), namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,33$). Ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian sudah tidak lagi menjadi penentu utama dalam menyerap tenaga kerja, meskipun masih berperan sebagai penopang dasar ekonomi lokal. Sebaliknya, sektor tersier (S) menunjukkan **pengaruh positif signifikan** terhadap serapan tenaga kerja dengan koefisien **+4,32** ($p = 0,0014$). Makna dari hasil ini sangat penting. Pertumbuhan sektor jasa di wilayah aglomerasi Gorontalo — seperti perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keuangan — menjadi **motor baru penyerapan tenaga kerja perkotaan**. Banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian kini beralih ke pekerjaan jasa, baik formal maupun informal. Contohnya, dari petani menjadi pedagang, sopir, pegawai toko, atau penyedia layanan publik.

Dalam teori Sasaki, hal ini menggambarkan munculnya *service amplification effect*, yaitu situasi di mana ekspansi sektor jasa memperluas kesempatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan industri, karena jasa lebih fleksibel terhadap dinamika kota dan tidak terlalu bergantung pada investasi besar.

Dengan demikian, sektor jasa tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berfungsi sebagai “jembatan sosial-ekonomi” bagi tenaga kerja yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Gorontalo mulai

bertransformasi menuju **keseimbangan baru antara kegiatan produksi dan kegiatan layanan perkotaan.**

C. Pengaruh Gabungan Sektor Sekunder dan Tersier Terhadap Serapan Tenaga Kerja.

Dependent Variable: L/POP
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.997066	0.322606	-9.290184	0.0000
M+S	3.653315	0.344675	10.59930	0.0000

Model ketiga memperlihatkan hasil yang paling kuat dan positif. Gabungan sektor sekunder dan tersier (M + S) berpengaruh **positif dan sangat signifikan** terhadap tingkat serapan tenaga kerja, dengan koefisien **+3,65 ($p < 0,001$)** dan nilai R^2 sebesar **0,83**. Artinya, sekitar 83 persen variasi tingkat serapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh pertumbuhan kedua sektor ini secara bersamaan.

Hasil ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *agglomeration employment effect* — yaitu efek penggandaan lapangan kerja yang muncul karena interaksi erat antara industri dan jasa di wilayah perkotaan. Ketika kegiatan industri tumbuh, permintaan terhadap jasa penunjang seperti transportasi, perdagangan, logistik, dan layanan profesional juga meningkat. Kombinasi ini menciptakan **lingkaran ekonomi produktif** yang memperluas lapangan kerja secara menyeluruh.

Pada konteks Koata Gorontalo, hasil ini menandakan bahwa sumber utama penciptaan lapangan kerja bukan lagi dari pertanian, melainkan dari **sinergi antara kegiatan industri dan jasa yang terkonsentrasi di pusat kota**. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa wilayah aglomerasi Kota Gorontalo mulai memasuki tahap kematangan struktural, di mana urbanisasi dan diversifikasi ekonomi berjalan seiring. Namun, seperti diingatkan Sasaki, jika efek aglomerasi tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan kerja bisa terkonsentrasi di pusat kota saja, sementara daerah hinterland tertinggal. Karena itu, penguatan konektivitas antara kota dan wilayah penyangga menjadi kunci keberlanjutan.

D. Perbandingan Antar Model dan Implikasi Kebijakan Daerah

Tabel 13 Perbandingan Antar Model terhadap Serapan Tenaga Kerja

Model	Kombinasi Sektor	Arah & Signifikansi	Makna terhadap Serapan Tenaga Kerja
(a)	A & M	A (-) signifikan, M (-) signifikan	Dominasi pertanian dan industri awal menekan serapan kerja; transisi belum matang.
(b)	A & S	A (+) tidak signifikan, S (+) signifikan	Sektor jasa mulai menjadi penggerak utama lapangan kerja di perkotaan.
(c)	M + S	(+) signifikan kuat	Integrasi industri-jasa menciptakan efek aglomerasi dan ekspansi lapangan kerja.

Dari ketiga model tersebut, terlihat bahwa arah perubahan ekonomi Kota Gorontalo bergerak dari ketergantungan pada sektor primer menuju sektor modern — industri dan jasa. Namun, transformasi ini **belum** sepenuhnya merata. Daya serap kerja sektor industri masih terbatas, sementara jasa berkembang lebih cepat di pusat kota. Dalam kerangka perencanaan **pembangunan** daerah, hasil ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. **Penguatan sektor jasa produktif.** Pemerintah daerah perlu memperluas kegiatan jasa bernilai tambah tinggi seperti keuangan, transportasi modern, dan pendidikan, yang menyerap tenaga kerja terampil.
2. **Pengembangan industri skala menengah.** Agar industri tidak hanya tumbuh padat modal, perlu strategi pengembangan industri berbasis tenaga kerja lokal, misalnya industri makanan olahan, tekstil, dan produk berbasis sumber daya lokal.
3. **Penyebaran aktivitas ekonomi ke wilayah penyangga.** Pertumbuhan industri dan jasa sebaiknya diarahkan juga ke daerah sekitar seperti Limboto, Telaga, dan Tibawa untuk mengurangi kepadatan di pusat kota dan meningkatkan pemerataan kerja.
4. **Peningkatan keterampilan tenaga kerja.** Pelatihan berbasis kompetensi (vokasional) menjadi kunci agar tenaga kerja lokal dapat masuk ke sektor modern.

Hasil ini memperkuat gagasan Sasaki (1997) bahwa **perubahan struktur ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur tenaga kerja**. Kota Gorontalo kini sedang berada pada fase penting dalam transisi ekonomi: dari masyarakat agraris menuju masyarakat urban dengan dominasi sektor jasa dan industri. Tantangan ke depan bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan bahwa

lapangan kerja tersebut **terdistribusi secara merata** di seluruh wilayah aglomerasi, sehingga pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga motor pemerataan kesejahteraan.

4.3.5 Peran Urbanisasi terhadap Serapan Tenaga Kerja di Kota Gorontalo

A. Hasil Utama dan Arah Hubungan

Dependent Variable: L/POP
Sample: 2000 2024

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.436934	0.514711	-6.677409	0.0000
U	0.319009	0.042547	7.497730	0.0000

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel urbanisasi (U) berpengaruh **positif dan sangat signifikan** terhadap tingkat serapan tenaga kerja (L/POP). Koefisien urbanisasi sebesar **+0,3190 ($p < 0,001$)**, dengan **$R^2 = 0,7097$** , berarti bahwa sekitar **71% variasi tingkat serapan tenaga kerja** di Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat urbanisasi.

Secara sederhana, hasil ini menunjukkan bahwa **semakin tinggi tingkat urbanisasi, semakin besar pula proporsi penduduk yang bekerja secara produktif**. Kota Gorontalo, dalam konteks ini, memperlihatkan bahwa urbanisasi **tidak hanya menambah jumlah penduduk perkotaan, tetapi juga memperluas kapasitas ekonomi untuk menampung tenaga kerja baru**.

Dalam kerangka teori **Komei Sasaki (1997)**, hubungan positif ini menandakan bahwa Kota Gorontalo sedang berada pada tahap **“productive urbanization phase”** — yaitu fase di mana pertumbuhan penduduk perkotaan diiringi oleh ekspansi sektor industri dan jasa yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru.

B. Makna Ekonomi dan Sosial Hasil Regresi

Koefisien positif sebesar **0,3190** menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan urbanisasi berasosiasi dengan **kenaikan 0,32 poin proporsi tenaga kerja terhadap populasi**. Maknanya, urbanisasi di Gorontalo memiliki **dampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja**, baik di sektor formal maupun informal. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor empiris:

1. **Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan yang Inklusif.**

Pertambahan penduduk di Kota Gorontalo tidak semata-mata meningkatkan beban, tetapi juga **memperluas pasar tenaga kerja**. Penduduk yang datang ke kota biasanya membawa keterampilan baru, membentuk usaha kecil, atau mengisi kebutuhan jasa perkotaan seperti transportasi, perdagangan, dan pendidikan.

2. **Integrasi Wilayah Aglomerasi yang Meningkat.**

Peningkatan urbanisasi di Kota Gorontalo juga diikuti oleh semakin kuatnya konektivitas dengan daerah hinterland seperti Telaga, Limboto, dan Tibawa. Banyak penduduk dari wilayah tersebut bekerja di pusat kota setiap hari, menciptakan **sirkulasi tenaga kerja harian (commuter economy)** yang memperluas jangkauan pasar kerja perkotaan. Ini mencerminkan kondisi yang oleh Sasaki disebut *spatial integration effect*, di mana pertumbuhan kota utama meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah penyangganya.

3. **Dominasi Sektor Jasa dalam Penyerapan Kerja.**

Urbanisasi mendorong tumbuhnya sektor jasa — baik formal (pendidikan, keuangan, pemerintahan) maupun informal (perdagangan kecil, transportasi, jasa rumah tangga). Sektor ini padat karya dan relatif mudah diakses oleh penduduk baru, sehingga pertumbuhan penduduk kota secara langsung memperluas penyerapan tenaga kerja.

C. **Interpretasi Teoretis Berdasarkan Sasaki (1997)**

Hubungan positif antara urbanisasi dan serapan tenaga kerja menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah memasuki **fase keseimbangan produktif antara urban concentration dan economic absorption**. Dalam fase ini, kota berfungsi bukan hanya sebagai pusat administrasi atau pemukiman, tetapi sebagai **pusat kegiatan ekonomi yang dinamis dan beragam**.

Sasaki membagi dinamika urbanisasi menjadi tiga tahap besar:

1. **Early Stage (Dispersed Urbanization):** Urbanisasi meningkat, tetapi belum menciptakan lapangan kerja karena industri dan jasa masih lemah.
2. **Middle Stage (Productive Urbanization):** Urbanisasi sejalan dengan ekspansi sektor modern; setiap kenaikan penduduk perkotaan diiringi oleh pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan.
3. **Late Stage (Congested Urbanization):** Kota menjadi terlalu padat, sektor ekonomi jenuh, dan lapangan kerja sulit tumbuh lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Kota Gorontalo berada pada tahap kedua — “Productive Urbanization.”** Artinya, kota ini sedang berada pada momentum penting, di mana **urbanisasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kerja**, bukan beban. Namun, perlu diingat bahwa fase ini bersifat sementara. Jika pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi produktif, maka kota dapat bergeser ke fase ketiga, yaitu *congested urbanization*. Karena itu, pengelolaan urbanisasi menjadi krusial agar momentum produktif ini berkelanjutan.

D. Dampak Positif Urbanisasi terhadap Pasar Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi dan pengamatan empiris, dampak positif urbanisasi di Gorontalo dapat dijelaskan melalui tiga mekanisme utama:

1. Efek Skala Ekonomi (*Scale Effect*).

Semakin padat penduduk kota, semakin efisien berbagai kegiatan ekonomi karena biaya transportasi menurun, pasar tenaga kerja lebih luas, dan pertukaran informasi lebih cepat. Hal ini meningkatkan produktivitas dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru.

2. Efek Penggandaan (*Multiplier Effect*).

Penduduk yang bertambah berarti meningkatnya permintaan atas barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini mendorong munculnya bisnis baru dan memperluas jaringan pekerjaan.

3. Efek Konektivitas Spasial (*Spatial Synergy*).

Urbanisasi meningkatkan interaksi antara pusat kota dan daerah hinterland. Banyak tenaga kerja dari wilayah sekitar berpartisipasi dalam ekonomi kota tanpa harus tinggal di pusat kota. Hal ini mengurangi beban pemukiman dan memperluas kesempatan ekonomi ke daerah sekitar.

Ketiga efek ini disebut sebagai *agglomeration benefits* — manfaat ekonomi yang timbul dari konsentrasi kegiatan manusia dalam satu wilayah yang saling terhubung.

E. Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah

Hasil positif ini memberikan pesan strategis bagi Pemerintah Daerah Gorontalo untuk **mempertahankan urbanisasi yang produktif dan inklusif**. Beberapa kebijakan penting yang dapat diambil meliputi:

1. Mendorong pemerataan kegiatan ekonomi antarwilayah aglomerasi.

Wilayah seperti Telaga, Tibawa, dan Limboto dapat dikembangkan sebagai sub-pusat kegiatan ekonomi baru, agar efek positif urbanisasi menyebar lebih luas dan tidak hanya terpusat di Kota Gorontalo inti.

2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Pertumbuhan penduduk kota harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM agar urbanisasi tidak berubah menjadi pengangguran perkotaan. Program pelatihan, wirausaha, dan pendidikan vokasional menjadi penting.

3. Memperkuat sektor jasa produktif.

Karena sektor jasa terbukti menjadi penyerapan kerja utama, maka perlu didorong kegiatan seperti logistik, keuangan, pendidikan, dan pariwisata berbasis perkotaan.

4. Mengelola pertumbuhan kota secara berimbang.

Pemerintah perlu menjaga agar urbanisasi tidak melampaui kapasitas infrastruktur dan lingkungan. Pengembangan perumahan, transportasi, dan ruang publik harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

F. Sintesis Makna Ekonomi Regional

Persamaan regresi $L/POP = -3.4369 + 0.3190U$ menunjukkan bahwa:

1. Urbanisasi berperan **sebagai kekuatan produktif** yang memperluas kesempatan kerja.
2. Hubungan positif ini menandakan **efisiensi aglomerasi**: kota semakin padat, tetapi juga semakin produktif.
3. Kota Gorontalo kini sedang mengalami **urban economic acceleration**, yaitu tahap di mana pertumbuhan kota mendorong ekspansi tenaga kerja dan sektor modern.

Situasi ini adalah bentuk “**urban–employment synchronization**” — ketika dinamika kependudukan dan dinamika ekonomi berjalan seirama. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan ini hanya akan berkelanjutan bila pemerintah mampu menata ruang ekonomi secara efisien dan mengelola keseimbangan antara pusat kota dan wilayah penyangga.

Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa **urbanisasi di Kota Gorontalo saat ini adalah urbanisasi yang produktif dan berdaya serap tinggi**. Penduduk yang bertambah tidak menimbulkan beban ekonomi, melainkan memperkuat pasar tenaga kerja, memperluas sektor jasa, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Namun, perlu diingatkan agar urbanisasi tetap menjadi sumber kekuatan, **pemerintah daerah harus menata ulang struktur aglomerasi** — bukan untuk menghambat pertumbuhan kota, tetapi untuk memastikan bahwa setiap penduduk baru yang datang memiliki peluang untuk bekerja, berproduksi, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah.

4.3.6 Peran Kota Gorontalo sebagai Central Place Ekonomi Regional

A. Keterkaitan Ekonomi Antara Kota Gorontalo dan Wilayah Hinterland

Tabel 14 Keterkaitan Ekonomi Antara Kota Gorontalo dan Wilayah Hinterland

Deg of Cor	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	BoneBol	GorUt	K.Gorontalo	Jumlah	Urutan
Boalemo	1.0000	0.9761	0.9691	0.9765	0.8589	0.9767	5.757	3
Gorontalo	0.9761	1.0000	0.9541	0.9845	0.8191	0.9777	5.711	4
Pohuwato	0.9691	0.9541	1.0000	0.9484	0.8453	0.9502	5.667	5
BoneBol	0.9765	0.9845	0.9484	1.0000	0.8734	0.9925	5.775	2
GorUt	0.8589	0.8191	0.8453	0.8734	1.0000	0.8987	5.295	6
K. Gorontalo	0.9767	0.9777	0.9502	0.9925	0.8987	1.0000	5.796	1

Hasil matriks korelasi antar $\Delta(\text{PDRB})$ menunjukkan adanya **hubungan ekonomi yang sangat kuat antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo**. Nilai korelasi berkisar antara 0.82 hingga 0.99, yang berarti bahwa **setiap wilayah cenderung mengalami pertumbuhan dan perlambatan ekonomi dalam arah yang sama**. Fenomena ini merupakan indikasi awal terbentuknya **keterpaduan sistem ekonomi regional** (regional linkage) di mana Kota Gorontalo memainkan peran kunci. Kota Gorontalo memiliki **total derajat korelasi tertinggi (5.796)** di antara semua wilayah. Nilai ini menggambarkan bahwa **perekonomian Kota Gorontalo memiliki pengaruh paling besar terhadap dinamika pertumbuhan seluruh kabupaten lain**—Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara. Kondisi seperti ini menandai posisi Kota Gorontalo sebagai **“central place”**, yaitu pusat aktivitas ekonomi yang memancarkan pengaruhnya ke daerah-daerah sekitarnya melalui mekanisme aglomerasi dan keterkaitan spasial.

Keterkaitan paling kuat terlihat antara **Kota Gorontalo dan Bone Bolango ($r = 0.9925$)**, diikuti oleh hubungan dengan **Kabupaten Gorontalo ($r = 0.9777$)** dan **Boalemo ($r = 0.9767$)**. Hal ini mencerminkan adanya **kontinuitas interaksi ekonomi, perdagangan, dan tenaga kerja** antara Kota Gorontalo dan wilayah-wilayah terdekat yang membentuk inti aglomerasi perkotaan (urban core). Sebaliknya, korelasi yang relatif lebih rendah dengan **Gorontalo Utara ($r = 0.8987$)** menandakan bahwa **efek**

pengaruh pusat ekonomi mulai melemah seiring bertambahnya jarak dan keterbatasan konektivitas.

Dengan demikian, pola korelasi antar $\Delta(\text{PDRB})$ menunjukkan bahwa **aktivitas ekonomi Provinsi Gorontalo bersifat terpusat secara fungsional**. Kota Gorontalo menjadi sumber getaran utama yang menentukan irama pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya—suatu pola yang disebut sebagai “*urban synchronization effect*.”

B. Pengaruh Kota Gorontalo terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hinterland

$\Delta Y = a + b\Delta X$	Boalemo		Gorontalo		Pohuwato		Bone Bolango		Gorontalo Utara	
	Coeffici.	P-value	Coeffici.	P-value	Coeffici.	P-value	Coeffici.	P-value	Coeffici.	P-value
Intercept	7918.2	0.20288	43022.07	0.007373	22158.32	0.063231	-1931.66	0.562444	-21501.2	0.073983
Kota Gorontalo	0.50371	1.59E-15	1.240537	1.01E-15	0.632204	4.21E-12	0.488201	1.22E-20	0.42998	5.78E-09

Untuk memperkuat bukti empiris dari hubungan korelasi di atas, dilakukan analisis regresi diferensial dengan model:

$$\Delta Y_i = a + b\Delta X_{\text{Kota Gorontalo}}$$

di mana ΔY_i adalah perubahan PDRB kabupaten hinterland, dan $\Delta X_{\text{Kota Gorontalo}}$ adalah perubahan PDRB Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh wilayah hinterland memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap dinamika ekonomi Kota Gorontalo. Artinya, setiap kali terjadi peningkatan PDRB di Kota Gorontalo, maka perekonomian kabupaten lain ikut terdorong naik, meskipun dengan tingkat sensitivitas besaran perubahan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena besar nilai pdrb kabupaten-kabupaten tersebut berbeda-beda. Rincian hasilnya sebagai berikut:

Wilayah Hinterland	Koefisien b	P-Value	Interpretasi
Kabupaten Gorontalo	1.2405	< 0.01	Respons tertinggi; pertumbuhan Kota Gorontalo menimbulkan efek pengganda besar terhadap kabupaten ini.
Pohuwato	0.6322	< 0.01	Respons moderat; meskipun jauh, tetap mengalami efek spillover.
Boalemo	0.5037	< 0.01	Hubungan menengah; integrasi cukup kuat namun tidak seintens inti aglomerasi.
Bone Bolango	0.4882	< 0.01	Integrasi tinggi karena kedekatan geografis; pertumbuhan stabil.
Gorontalo Utara	0.4300	< 0.01	Respons paling lemah; jarak dan akses transportasi membatasi keterkaitan ekonomi.

Koefisien $b > 0$ pada seluruh wilayah menunjukkan **arah pertumbuhan ekonomi yang sejalan** dengan Kota Gorontalo. Kabupaten Gorontalo memiliki nilai b

> 1 , yang berarti setiap kenaikan satu unit pertumbuhan di Kota Gorontalo mendorong peningkatan lebih besar di wilayah ini—indikasi adanya **spillover yang kuat dan integrasi ekonomi mendalam**. Namun, wilayah seperti Gorontalo Utara dan Bone Bolango memiliki nilai $b < 0.5$, hal ini disebabkan kedua daerah mempunyai nilai ekonomi yang relative cukup kecil di bandingkan dengan daerah lainnya.

C. Penafsiran Berdasarkan Teori Sasaki (1997)

Interaksi antara kota pusat dan wilayah hinterland tidak hanya bersifat linear, tetapi juga mencerminkan **mekanisme gaya ekonomi (economic force)** dalam ruang. Kota Gorontalo berperan sebagai **sumber gaya sentripetal (centripetal force)** yang menarik aktivitas ekonomi ke dalam kawasan intinya, menciptakan kepadatan produksi, tenaga kerja, dan konsumsi yang tinggi. Dampak dari gaya ini menimbulkan **efek sebaran (spillover)** yang menyebar keluar menuju kabupaten sekitarnya.

Hubungan positif antara $\Delta(\text{PDRB})$ Kota Gorontalo dan $\Delta(\text{PDRB})$ hinterland menunjukkan adanya **transmisi pertumbuhan antarwilayah**— atau “*regional propagation of economic momentum*.” Momentum pertumbuhan di pusat kota menciptakan efek pengganda yang menstimulasi permintaan barang, tenaga kerja, dan jasa di daerah sekitarnya. Wilayah yang memiliki infrastruktur, akses transportasi, dan jaringan perdagangan yang baik akan merasakan efek pengganda tersebut secara lebih nyata. Sebagai contoh:

1. **Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo** yang berlokasi paling dekat dengan pusat kota menikmati integrasi ekonomi tinggi karena mobilitas harian tenaga kerja dan perdagangan lintas batas administratif.
2. **Boalemo dan Pohuwato** masih menerima manfaat, tetapi dalam intensitas yang lebih rendah karena keterbatasan jarak tempuh dan konektivitas fisik.
3. **Gorontalo Utara**, dengan topografi lebih berat dan jarak lebih jauh, mengalami efek aglomerasi yang menurun secara spasial.

Pola seperti ini sebagai “*spatial decay of agglomeration effect*”, di mana pengaruh pusat menurun secara bertahap ke pinggiran, tetapi tetap menciptakan keterkaitan sistemik di tingkat regional.

D. Makna Ekonomi dan Implikasi Wilayah

Dari dua hasil utama—korelasi tinggi antar $\Delta(\text{PDRB})$ dan koefisien regresi positif signifikan—dapat disimpulkan bahwa **Kota Gorontalo saat ini berfungsi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo**. Pertumbuhan

kota menciptakan gelombang ekonomi yang menyebar secara radial ke wilayah sekitarnya, memperkuat integrasi regional.

Namun, temuan ini juga mengindikasikan adanya **ketergantungan ekonomi yang tinggi** pada pusat kota. Jika pertumbuhan Kota Gorontalo melambat, maka sebagian besar kabupaten hinterland juga berpotensi mengalami perlambatan karena kuatnya keterkaitan spasial tersebut. Oleh sebab itu, strategi pembangunan daerah perlu diarahkan pada **pembentukan sub-center ekonomi baru**—misalnya memperkuat peran Isimu, Tilango, atau Kabila sebagai simpul kegiatan ekonomi penyangga.

Dalam konteks kebijakan publik, hasil ini mengandung beberapa pesan penting:

1. **Pemerintah Provinsi perlu mengoptimalkan peran Kota Gorontalo sebagai lokomotif pertumbuhan regional.**

Investasi di sektor transportasi, logistik, dan jasa keuangan di Kota Gorontalo akan memberikan efek berantai ke wilayah lain.

2. **Pemerataan infrastruktur antarwilayah harus diperkuat.**

Keterhubungan fisik menentukan seberapa besar manfaat pertumbuhan kota dapat dirasakan oleh kabupaten hinterland.

3. **Perencanaan aglomerasi perlu diarahkan pada integrasi fungsional.**

Kota Gorontalo sebaiknya berperan bukan hanya sebagai pusat konsumsi, tetapi juga pusat produksi dan distribusi regional yang mendorong aktivitas ekonomi lintas kabupaten.

E. Sintesis dalam Perspektif Ekonomi regional

Jika dipetakan ke dalam model Sasaki (1997), sistem ekonomi Provinsi Gorontalo kini berada pada fase **“coherent regional agglomeration”**, di mana:

1. Urbanisasi dan industrialisasi telah membentuk sistem keterkaitan ekonomi yang relatif kuat antarwilayah,
2. Pertumbuhan pusat kota menjadi sumber utama *economic momentum*,
3. Namun, pola distribusi manfaatnya masih menurun secara spasial ke arah pinggiran.

Dalam kerangka *central place theory*, Kota Gorontalo saat ini berperan sebagai **“primary center”**, sedangkan kabupaten lain bertindak sebagai **“dependent sub-centers.”**

Ketergantungan yang kuat ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan: peluang untuk mempercepat pemerataan melalui konektivitas dan kolaborasi, namun tantangan karena potensi *urban over-centralization* bila peran kabupaten tidak diperkuat.

Secara empiris, hasil korelasi dan regresi menunjukkan bahwa **Kota Gorontalo bukan hanya pusat administratif, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi yang menentukan dinamika pembangunan regional**. Setiap lonjakan atau perlambatan ekonomi di Kota Gorontalo secara nyata memengaruhi kabupaten lain di Provinsi Gorontalo, membentuk sistem ekonomi yang terintegrasi dan saling bergantung. Dalam perspektif wilayah, ini adalah **ciri khas dari urban system yang produktif tetapi memerlukan penataan ulang (re-structuring)** agar keseimbangan antara pusat dan hinterland dapat terjaga secara berkelanjutan.

V. Mobilitas Penduduk wilayah Antara Kota Gorontalo dan Wilayah Hinterland.

Tabel 15. Matriks Mobilitas Penduduk Antar Wilayah

Deg of Cor	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	BoneBol	GorUt	K.Gorontalo
Boalemo	1.000	-0.946	1.000	0.634	-0.994	0.999
Gorontalo	-0.946	1.000	-0.945	-0.400	0.968	-0.929
Pohuwato	1.000	-0.945	1.000	0.639	-0.994	0.999
BoneBol	0.634	-0.400	0.639	1.000	-0.562	0.659
GorUt	-0.994	0.968	-0.994	-0.562	1.000	-0.990
K. Gorontalo	0.999	-0.929	0.999	0.659	-0.990	1.000

Mobilitas penduduk merupakan fenomena spasial yang menggambarkan interaksi antar wilayah akibat ketimpangan sosial-ekonomi. Mobilitas penduduk di Provinsi Gorontalo memiliki pola yang sangat jelas antara Kota Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (central place) dan lima kabupaten hinterland: Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo, dan Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo menjadi magnet utama migrasi karena memiliki: (a) Konsentrasi aktivitas ekonomi (perdagangan, jasa, dan pemerintahan), (b) Infrastruktur terbaik di provinsi (jalan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi), (c) Daya tarik sosial (akses pendidikan tinggi dan kualitas hidup lebih tinggi).

Sementara itu, wilayah hinterland berperan sebagai daerah asal (origin) pergerakan penduduk karena faktor-faktor pendorong seperti: (a) Rendahnya tingkat pendapatan per kapita, (b) Terbatasnya lapangan kerja formal, (c) Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian subsisten.

Dari seluruh kabupaten, Kabupaten Gorontalo Utara menempati posisi paling lemah secara ekonomi — memiliki pendapatan per kapita terendah di Provinsi

Gorontalo dan menunjukkan keterkaitan kuat terhadap hampir semua kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan intensitas tinggi migrasi keluar dari wilayah tersebut.

4.3.7 Interpretasi Mobilitas Penduduk Antar Wilayah

Tabel korelasi menunjukkan hubungan antarperubahan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Korelasi **negatif kuat ($r < -0.90$)** menunjukkan mobilitas aktif antarwilayah, sedangkan **positif kuat ($r > 0.90$)** menandakan pertumbuhan yang searah karena faktor eksternal bersama (misalnya, tren kelahiran atau kebijakan umum).

1. Migrasi Utara – Barat/Timur

Gorontalo Utara – Boalemo ($r = -0.994$): Perubahan penduduk di kedua wilayah ini berlawanan arah. Ketika penduduk Boalemo meningkat, Gorontalo Utara menurun, menandakan mobilitas dua arah yang intens. Hal ini bisa dihubungkan dengan pergerakan tenaga kerja informal lintas batas kabupaten akibat kesamaan sektor basis (pertanian dan perikanan).

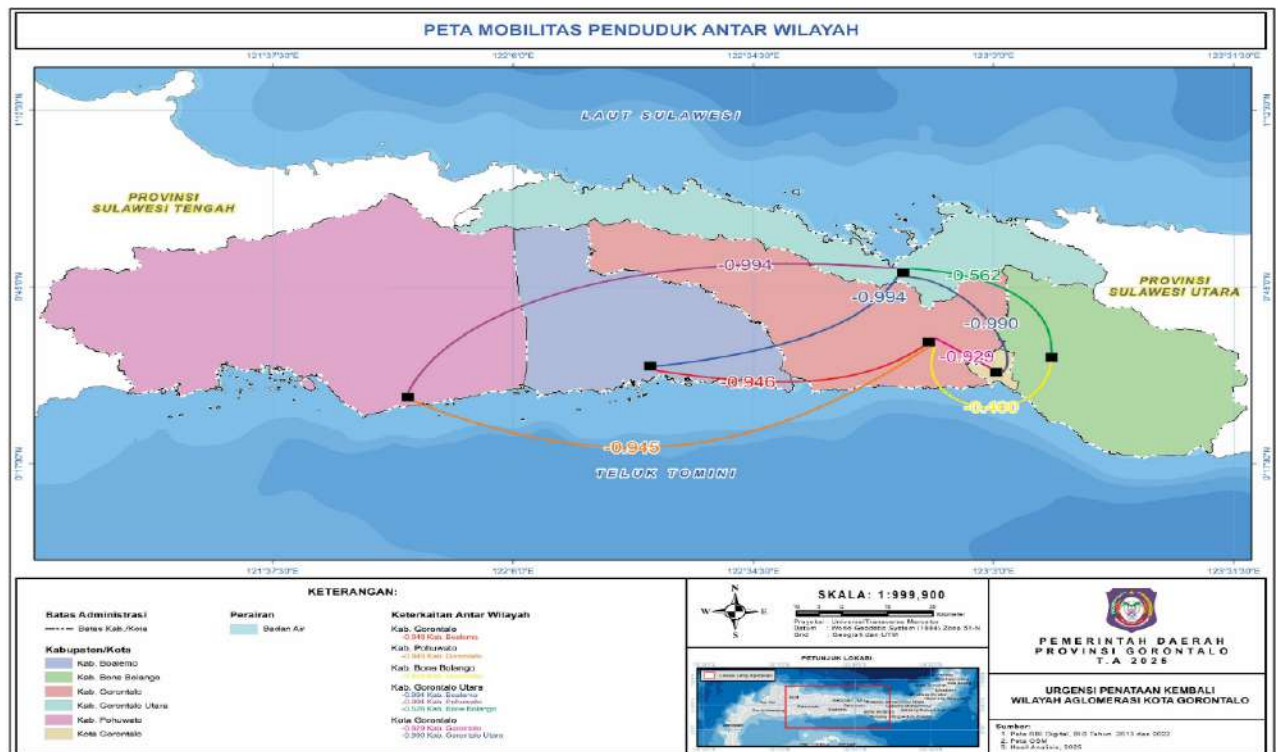
Gorontalo Utara – Pohuwato ($r = -0.994$): Hubungan ini menunjukkan migrasi barat–utara dengan intensitas tinggi, kemungkinan karena keterhubungan pekerjaan daerah tersebut.

Gorontalo Utara – Bone Bolango ($r = -0.562$): Hubungan ini menunjukkan migrasi barat–timur dengan intensitas sedang, kemungkinan karena keterhubungan dengan lapangan pekerjaan daerah tersebut.

Gorontalo Utara – Kota Gorontalo ($r = -0.990$): Nilai ini mempertegas bahwa penduduk Gorontalo Utara cenderung bermigrasi ke Kota Gorontalo akibat disparitas pendapatan dan peluang kerja. Dengan pendapatan per kapita yang terendah, Gorontalo Utara menjadi *push area* utama dalam peta mobilitas penduduk provinsi ini.

Kabupaten Gorontalo – Kota Gorontalo ($r = -0.929$): Korelasi ini menggambarkan arus migrasi rural–urban klasik. Banyak penduduk dari Kabupaten Gorontalo berpindah ke Kota Gorontalo untuk bekerja, bersekolah, atau berusaha di sektor jasa dan perdagangan. Kemungkinan Kabupaten Gorontalo juga sebagai daerah transit dari wilayah Utara dan wilayah Barat menuju Kota Gorontalo

2. Visual Arah Mobilitas Penduduk



Gambar 14. Mobilitas Penduduk Antar Wilayah

- Kab. Gorontalo Utara → Kab. Boalemo → Kab. Gorontalo → Kota Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara → Kab. Pohuwato → Kab. Gorontalo → Kota Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara → Kab. Bone Bolango → Kab. Gorontalo → Kota Gorontalo
- Kab. Gorontalo ↔ Kab. Bonebolango(Kota Gorontalo)
- Kab. Gorontalo Utara → Kab. Bone-Bolango(Kota Gorontalo)
- Kab. Gorontalo Utara → Kota Gorontalo

Secara keseluruhan, pola migrasi menggambarkan hierarki spasial: Hinterland (Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango) → Kabupaten Gorontalo → Kota Gorontalo.

4.4 Kajian Aktivitas Sosial Ekonomi Perkembangan Wilayah Fungsional Kota Gorontalo

4.4.1 Presepsi Masyarakat Kota dan Kabupaten

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap persepsi masyarakat di tiga wilayah aglomerasi, Kota Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden di masing-masing wilayah kemudian dianalisis secara statistika deskriptif

menggunakan SPSS untuk menggambarkan distribusi kualitatif pandangan masyarakat terhadap perkembangan sosial dan ekonomi kawasan, termasuk aspek pembangunan, kepadatan penduduk, infrastruktur, dan penilaian kebijakan terkait pemanfaatan fungsi kota. Perbandingan persepsi Masyarakat di Wilayah Aglomerasi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Perbandingan Persepsi Masyarakat di Wilayah Aglomerasi Gorontalo

Aspek yang Dinilai	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	Kota Gorontalo	Keterangan Umum
Persepsi Umum terhadap Pembangunan	66,7% setuju bahwa pembangunan meningkat, meski berlangsung bertahap.	90% setuju pembangunan berjalan baik dan merata.	68,6% setuju kemajuan pembangunan terus dirasakan.	Semua wilayah menilai pembangunan meningkat.
Kepadatan Penduduk & Mobilitas	66,7% merasa kepadatan penduduk meningkat akibat kedekatan dengan pusat kota.	83,3% menilai kepadatan penduduk meningkat karena kedekatan dengan pusat kota.	57,1% mengakui peningkatan kepadatan di wilayah perbatasan kota dan Kabupaten	Kepadatan meningkat di Kota Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
Urban Sprawl & Alih Fungsi Lahan	50% mulai merasakan perluasan kota dan perubahan fungsi lahan di wilayahnya.	60% setuju fenomena <i>urban sprawl</i> semakin terlihat.	62,9% merasakan ekspansi kota dan pergeseran fungsi lahan ke area pinggiran.	Fenomena <i>Urban sprawl</i> sudah semakin terlihat di wilayah penyangga Kota Gorontalo.
Ketergantungan terhadap Layanan Kota	46,7% masih bergantung pada fasilitas kota seperti pendidikan dan kesehatan.	46,7% juga masih bergantung pada fasilitas publik yang ada di Kota Gorontalo.	Masyarakat Kota Gorontalo setuju bahwa fasilitas publik yang ada juga dimanfaatkan oleh Masyarakat Kabupaten.	Kabupaten masih bergantung pada fasilitas publik perkotaan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

A. Masyarakat Kabupaten Gorontalo

Masyarakat Kabupaten Gorontalo secara umum memiliki pandangan positif terhadap arah pembangunan wilayahnya, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo. Sebanyak 66,7% responden menyatakan setuju bahwa pembangunan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan, walaupun sebagian besar menilai perubahan tersebut masih berlangsung secara bertahap. Sebesar 66,7% responden juga merasakan peningkatan kepadatan penduduk di wilayahnya, yang diiringi dengan peningkatan biaya hidup. Kondisi ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas sosial-ekonomi akibat meningkatnya mobilitas penduduk dari dan ke Kota Gorontalo sebagai pusat aktivitas utama. Fenomena ini

menggambarkan mulai terjadinya pergeseran karakter wilayah dari agraris menuju semi-perkotaan, dimana masyarakat perbatasan semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi perkotaan seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

Dalam aspek infrastruktur dan aksesibilitas, 76,7% masyarakat menilai akses transportasi sudah baik, meskipun masih ada beberapa titik jalan yang perlu perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antara Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sudah mulai terbentuk dengan baik, sehingga mendukung arus barang, jasa, dan tenaga kerja menuju pusat kota. Keterbukaan akses ini berperan penting dalam memperkuat keterkaitan ekonomi antara kabupaten dan Kota Gorontalo, yang merupakan ciri khas dari wilayah aglomerasi yang sedang tumbuh.

Sementara itu, 50% responden mengakui mulai merasakan fenomena *urban sprawl*, yakni perluasan pengaruh aktivitas perkotaan hingga ke wilayah perbatasan. Masyarakat menilai perubahan tata guna lahan dan peningkatan intensitas pembangunan di kawasan pinggiran sebagai tanda bahwa batas antara Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo semakin kabur secara fungsional. Namun, 46,7% masyarakat juga menyatakan masih bergantung pada layanan publik Kota Gorontalo, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan administrasi, yang menunjukkan bahwa peran kabupaten sebagai wilayah penyangga masih kuat tetapi belum sepenuhnya mandiri secara pelayanan publik. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo tengah berada pada tahap transisi sosial-ekonomi, dimana masyarakat mulai merasakan peningkatan aktivitas ekonomi dan integrasi spasial dengan kota, namun masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan kemandirian pelayanan dasar di tingkat lokal.

B. Masyarakat Kabupaten Bone Bolango

Masyarakat Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya terhadap arah pembangunan yang terjadi di daerah mereka. Sebagian besar responden yaitu 90% menyatakan setuju bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan pesat. Persepsi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat nyata dari berbagai program pembangunan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Kota Gorontalo. Selain itu, 83,3% masyarakat menilai kepadatan penduduk yang meningkat selama 5 tahun terakhir di wilayah perbatasan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, yang menunjukkan berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi. Meningkatnya kepadatan ini tidak hanya

disebabkan oleh pertumbuhan alami, tetapi juga oleh mobilitas penduduk menuju kawasan yang menawarkan akses ekonomi lebih luas. Banyak warga mulai terlibat dalam kegiatan perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi perkotaan lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Bone Bolango telah menjadi wilayah penyangga yang aktif.

Dari sisi infrastruktur, hasil survei memperlihatkan penilaian yang sangat positif. Sebanyak 93,3% responden menilai infrastruktur dasar sudah baik dan 86,7% setuju bahwa akses transportasi antara wilayah Kabupaten dan Kota sudah memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan jalan, sarana umum, dan fasilitas dasar di Bone Bolango sudah relatif berkembang, mendukung keterhubungan antarwilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Peningkatan aksesibilitas ini juga memperkuat integrasi wilayah Bone Bolango dengan Kota Gorontalo sebagai pusat kegiatan utama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bone Bolango menikmati efek positif dari perkembangan kawasan aglomerasi Gorontalo, terutama dalam hal akses infrastruktur dan peluang ekonomi. Namun, mereka juga berharap agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan turut memperhatikan pemerataan dan penguatan kapasitas di tingkat lokal. Dengan kondisi ini, Bone Bolango menempati posisi strategis sebagai wilayah penyangga yang adaptif dan prospektif, yang terus tumbuh melalui keterkaitan ekonomi dengan Kota Gorontalo tanpa kehilangan jati diri administratif maupun sosialnya.

C. Masyarakat Kota Gorontalo

Berbeda dengan dua wilayah penyangganya, masyarakat Kota Gorontalo menilai bahwa pembangunan di wilayah mereka sudah berada pada tahap yang lebih maju dan stabil. Sebesar 68,6% responden menyatakan setuju bahwa kemajuan pembangunan terus dirasakan selama lima tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan aktivitas ekonomi di Kota Gorontalo, 65,7% responden juga menilai biaya hidup mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo memiliki *multiplier effect*, di satu sisi menciptakan peluang pendapatan, namun di sisi lain meningkatkan tekanan terhadap biaya kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini lazim terjadi di wilayah perkotaan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan migrasi, di mana pertumbuhan permintaan terhadap lahan, perumahan, serta jasa mendorong biaya hidup ke tingkat yang lebih tinggi.

Dari sisi infrastruktur, masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Sekitar 40% responden menilai infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal drainase, fasilitas publik, dan pengelolaan lingkungan. Meski demikian, 74,3% responden menilai akses transportasi di dalam kota sudah mudah dijangkau, menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah di Kota Gorontalo cukup baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota telah berhasil membangun jaringan transportasi yang mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang, meskipun peningkatan kualitas infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan prioritas.

Sebanyak 62,9% masyarakat mengakui adanya pelebaran pembangunan keluar wilayah perkotaan, yang terlihat dari meningkatnya permukiman baru di pinggiran dan pergeseran fungsi lahan dari pertanian menjadi area terbangun. Perubahan ini menandakan adanya perluasan aktivitas kota yang melampaui batas administratif, mendorong terjadinya integrasi fungsional dengan wilayah sekitar.

Masyarakat Kota Gorontalo memiliki persepsi yang positif terhadap arah pembangunan kotanya. Mereka melihat kotanya bukan hanya sebagai pusat ekonomi dan pelayanan, tetapi juga sebagai motor penggerak integrasi kawasan aglomerasi. Peningkatan infrastruktur, perluasan ruang perkotaan, dan dinamika mobilitas menjadi bukti nyata bahwa kota ini memainkan peran sentral dalam memperkuat hubungan sosial dan ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Namun, masyarakat juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan yang cepat dengan pemerataan manfaat pembangunan agar seluruh wilayah aglomerasi dapat maju bersama secara berkelanjutan.

4.4.2 Persepsi Pelaku Usaha

Aktivitas perdagangan dan jasa tidak lagi terpusat di pusat kota, melainkan meluas ke wilayah sekitar sebagai bagian dari jejaring ekonomi yang saling bergantung. Dalam konteks ini, Kota Gorontalo berperan sebagai *central place* yang menjadi pusat pelayanan, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi utama, sementara Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango berkembang sebagai wilayah penyangga yang memperoleh manfaat melalui keterhubungan pasar, jaringan transportasi, serta akses layanan publik. Pola interaksi ini menunjukkan bahwa batas administratif sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Persepsi pelaku usaha terhadap perkembangan fungsional Kota dapat dilihat Pada Tabel 17

Tabel 17. Perbandingan Persepsi Pelaku Usaha di Kawasan Aglomerasi Gorontalo

Aspek yang Dinilai	Kabupaten Gorontalo & Bone Bolango	Kota Gorontalo	Keterangan Umum
Lokasi Usaha	100% setuju bahwa lokasi usaha yang berada dekat dengan Kota Gorontalo merupakan lokasi strategis dalam pengembangan usaha.	61,1% menilai lokasi usaha strategis karena berdekatan dengan wilayah Kabupaten	Konektivitas Kota dan Kabupaten mendukung aktivitas usaha lintas wilayah.
Ketergantungan terhadap Fasilitas Kota	73,3% masih bergantung pada layanan kota seperti perbankan, logistik, dan perizinan.	50% bergantung pada fasilitas publik kota untuk layanan pendukung usaha.	Ketergantungan tinggi Kota dan Kabupaten menunjukkan keterkaitan ekonomi fungsional.
Persepsi terhadap Alih Fungsi Lahan	53,3% pelaku usaha Kabupaten setuju terjadi alih fungsi lahan selama 5 tahun terakhir	61,1% setuju terjadi perubahan fungsi lahan akibat ekspansi ekonomi.	Transformasi ruang lebih tinggi di Kota Gorontalo
Mobilitas Usaha	66,7% menilai mobilitas meningkat; arus barang dan tenaga kerja ke kota lancar.	44,4% mengeluhkan kemacetan meningkat akibat kepadatan kegiatan perekonomian.	Kota mulai menghadapi tekanan mobilitas, kabupaten menjadi wilayah penyalur tenaga kerja dan logistik.
Dukungan Kebijakan Pemerintah	80% menilai dukungan pemerintah cukup memadai untuk pengembangan usaha.	83,3% menilai kebijakan pemerintah kota mendukung usaha dan sinergi antarwilayah.	Dukungan kebijakan tinggi di kedua wilayah; koordinasi lintas wilayah perlu diperkuat.
Peluang dan Pertumbuhan Usaha	100% melihat peluang usaha meningkat karena berdekatan dengan kota.	77,8% mengamati perkembangan pesat di wilayah perbatasan dan meningkatnya nilai komersial lahan.	Pertumbuhan usaha kuat di seluruh kawasan aglomerasi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

A. Pelaku Usaha Kota Gorontalo

Pelaku usaha di Kota Gorontalo secara umum menunjukkan persepsi yang sangat positif terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. Sebanyak 61,1% responden menyatakan bahwa lokasi usaha mereka berada di kawasan yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, pemasok, maupun mitra usaha. Selain itu, 66,7 % responden juga menilai bahwa akses jalan Kota ke Kabupaten sudah memadai dan sangat mendukung kelancaran aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan mobilitas tenaga kerja. Kondisi ini menegaskan bahwa pusat kota tetap menjadi magnet ekonomi utama, tempat berbagai sektor usaha berkembang.

Namun, perkembangan ekonomi yang pesat juga membawa konsekuensi terhadap tingkat kenyamanan dan mobilitas di wilayah perkotaan. Sekitar 44,4%

responden mengeluhkan meningkatnya kemacetan, yang menjadi tanda meningkatnya kepadatan arus kendaraan dan aktivitas perdagangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo telah mencapai titik dimana kapasitas infrastruktur jalan mulai menghadapi tekanan. Jika tidak diimbangi dengan manajemen transportasi dan tata ruang yang adaptif, kondisi ini dapat berpengaruh terhadap efisiensi logistik dan produktivitas usaha. Lebih lanjut, 77,8% pelaku usaha mengamati perkembangan pesat di wilayah perbatasan kota, terutama di kawasan perdagangan baru dan area permukiman yang tumbuh di pinggiran. Perkembangan ini sejalan dengan ekspansi ruang perkotaan yang semakin meluas dan peningkatan nilai komersial lahan di daerah pinggiran. Fenomena tersebut menjadi indikasi bahwa kegiatan ekonomi di Kota Gorontalo tidak hanya terpusat di inti kota, tetapi juga menyebar ke kawasan sekitar, menciptakan rantai nilai baru yang mendorong keterkaitan ekonomi antarwilayah.

Secara umum pelaku usaha di Kota Gorontalo menilai bahwa kondisi usaha di wilayah mereka semakin berkembang dan menjanjikan. Akan tetapi, mereka juga menyadari adanya tantangan baru berupa tekanan mobilitas, keterbatasan ruang usaha, dan kebutuhan tata kelola lintas batas yang lebih adaptif. Kota Gorontalo kini berada pada fase penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menggerakkan aktivitas lokal, tetapi juga memberikan *multiplier effect* bagi wilayah sekitar. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur, pengelolaan ruang perkotaan yang berkelanjutan, serta penguatan kerja sama ekonomi dengan kabupaten sekitar agar pertumbuhan kota tetap produktif dan inklusif.

B. Pelaku Usaha Kabupaten Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango

Pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo menunjukkan ketergantungan yang cukup kuat terhadap fasilitas dan aktivitas ekonomi di pusat kota. Sebanyak 73,3% responden menyatakan masih mengandalkan fasilitas utama di Kota Gorontalo, seperti layanan perbankan, perizinan usaha, logistik, dan pasokan bahan baku. Ketergantungan ini menggambarkan hubungan ekonomi yang bersifat fungsional, dimana kota berperan sebagai pusat pelayanan dan distribusi, sementara kabupaten menjadi bagian dari rantai pasok dan wilayah pendukung aktivitas perdagangan dan jasa.

Dari sisi mobilitas, 86,7% pelaku usaha menilai akses transportasi umum di wilayah mereka sudah baik, yang memudahkan arus barang, jasa, dan tenaga kerja menuju pusat kota. Aksesibilitas yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil.

Dari sisi ekonomi, hampir seluruh responden 100% mengakui bahwa peluang usaha di wilayah mereka meningkat, dan 80% merasakan dukungan pemerintah daerah cukup memadai. Hal ini menandakan bahwa wilayah penyangga di sekitar Kota Gorontalo mulai bertransformasi menjadi lokus pertumbuhan baru yang mendapat dorongan kuat dari kegiatan ekonomi kota. Dengan semakin banyaknya aktivitas perdagangan dan jasa yang berkembang di kawasan perbatasan, wilayah kabupaten kini menjadi bagian penting dari sistem ekonomi regional yang saling terhubung.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango berada pada posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan aglomerasi. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat dari *multiplier effect* pembangunan kota, tetapi juga mulai membentuk basis ekonomi lokal yang mandiri dan adaptif. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara integrasi ekonomi dengan kota dan pelestarian karakter wilayah kabupaten yang lebih rural. Diperlukan strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha lokal dan tata kelola ruang yang terkoordinasi lintas daerah agar pertumbuhan ekonomi kawasan berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

4.3.3 Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Aktivitas Sosial-Ekonomi Aglomerasi Kota Gorontalo

Tokoh masyarakat sebagai representasi pandangan publik yang lebih objektif menunjukkan persepsi yang secara umum positif terhadap perkembangan pembangunan kawasan aglomerasi Gorontalo. Sebanyak 55,6% setuju dan 33,3% sangat setuju bahwa pembangunan di wilayah aglomerasi berkembang pesat, yang ditopang oleh peningkatan perdagangan dan jasa karena 88,9% responden menilai aktivitas ekonomi semakin meningkat. Selain itu, kualitas prasarana jalan dan fasilitas publik mendapatkan penilaian yang baik ($\geq 33,3\%$ sangat setuju dan 100% setuju untuk fasilitas publik), menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan dasar relatif terfasilitasi dengan baik.

Persepsi terhadap fenomena menunjukkan 22,2% sudah merasakan dampak pelebaran kota pada kawasan pinggiran bersama dengan meningkatnya mobilitas

masyarakat (77,8% setuju), artinya proses ekspansi kota memang sedang terjadi, namun masih dalam tahapan awal dan belum terlalu dirasakan secara menyeluruh.

Dari aspek sosial-ekonomi dan fiskal, 77,8% tokoh Masyarakat menilai aglomerasi memberikan dampak positif, namun kekhawatiran mengenai potensi ketimpangan fiskal tetap muncul (88,9% setuju), terutama karena perbedaan kapasitas fiskal antara kota pusat dan wilayah penyangga yang ada di kabupaten. Hal ini sejalan dengan tingginya ketergantungan pada layanan publik di Kota Gorontalo (77,8% setuju) yang mempertegas peran kota sebagai *central place* dalam melayani wilayah sekitar. Dalam konteks tata kelola, 77,8% tokoh masyarakat sangat mendukung kerja sama Kota dan Kabupaten sebagai bentuk integrasi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah.

Tabel 18. Perspektif Aglomerasi oleh Tokoh Masyarakat

Aspek	Penilaian Tokoh Masyarakat	Implikasi Wilayah
Pembangunan ekonomi	Sangat berkembang dan berdampak besar	Potensi pertumbuhan regional semakin kuat
Mobilitas dan pelayanan	Ketergantungan tinggi pada Kota Gorontalo	Mempertegas peran kota sebagai pusat pelayanan
<i>Urban sprawl</i>	Mulai terjadi namun belum signifikan	Perlu antisipasi tata ruang perbatasan
Kesenjangan fiskal	Mulai dirasakan	Perlu mekanisme distribusi fiskal yang adil
Kebijakan dan kerja sama	Kerjasama lintas wilayah sangat didukung	Kota Gorontalo menunjukkan kesiapan sebagai pusat koordinasi dan kebijakan regional

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil penilaian tokoh masyarakat menunjukkan bahwa dinamika kawasan aglomerasi antara Kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya telah membentuk pola hubungan yang semakin erat, terutama dalam aspek ekonomi, mobilitas, dan kebijakan regional. Pembangunan ekonomi yang berkembang pesat di Kota Gorontalo menjadi magnet bagi aktivitas sosial dan usaha masyarakat kabupaten sekitarnya, sementara tingginya ketergantungan terhadap fasilitas kota menegaskan peran strategis Kota Gorontalo sebagai pusat pelayanan utama. Meskipun gejala urban sprawl dan kesenjangan fiskal mulai muncul, kondisi ini masih dapat dikelola melalui kebijakan tata ruang yang terpadu dan distribusi fiskal yang berkeadilan. Dengan dukungan kerja sama lintas wilayah yang kuat, Kota Gorontalo menunjukkan kesiapan untuk berperan sebagai simpul utama dalam tata kelola metropolitan yang mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan regional.

BAB V

REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Penetapan Bobot Kriteria (1–5) dan Alasan Akademis

Tabel 19 Penetapan Bobot dan Kriteria Hasil Analisis

Kriteria	Bobot	Alasan Akademis & Empiris (berdasarkan laporan)
K1. Analisis Spasial (tata ruang, perubahan lahan, daya dukung, autokorelasi spasial, tipologi peri-urban)	5	Data spasial menunjukkan tekanan paling kritis: peningkatan permukiman besar di Tilango–Telaga–Kabila; konversi sawah masif; hotspot GI* menegaskan konsentrasi tekanan; RTH <10%; risiko banjir meningkat; sprawl telah melampaui batas administratif. Spasial adalah fondasi semua rekomendasi.
K2. Kajian Proyeksi & Prediksi Tren Perkembangan Kota (struktur ekonomi, sektor PDRB, serapan tenaga kerja, urbanisasi, central place, mobilitas)	4	Proyeksi kepadatan, urbanisasi, serapan tenaga kerja, dan peran Kota Gorontalo sebagai pusat regional menegaskan urgensi penyatuan wilayah. Bukti kuantitatif memperkuat arah kebijakan jangka panjang.
K3. Kajian Aktivitas Sosial-Ekonomi (persepsi masyarakat–pelaku usaha–tokoh masyarakat)	3	Persepsi masyarakat peri-urban menunjukkan kebutuhan layanan kota, tetapi pelayanan belum merata. Dukungan sosial penting untuk legitimasi, namun bobot relatif lebih rendah dibanding tekanan spasial dan proyeksi ekonomi.
Total Bobot	12	

5.2 Rekomendasi Kebijakan Utama Berdasarkan Pembobotan (K1–K3)

Kebijakan disusun secara hierarkis menggunakan bobot:

K1 (5) > K2 (4) > K3 (3).

A. Kriteria dan Bobot

Kode Kriteria	Bobot
K1 Analisis Spasial (tata ruang, perubahan lahan, daya dukung/tampung, autokorelasi, tipologi peri-urban)	5
K2 Kajian Proyeksi & Prediksi Tren Perkembangan Kota Gorontalo	4
K3 Kajian Aktivitas Sosial-Ekonomi Wilayah Fungsional	3

Total bobot = **12**

Skala skor: **1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi** kontribusinya terhadap kriteria.

B. Penilaian Skor Tiap Opsi

Opsi 1 – Perluasan wilayah administrasi kota

- **K1 = 5** → secara spasial paling kuat karena menyelaraskan wilayah fungsional–administratif.
- **K2 = 5** → memperkuat peran ekonomi jangka panjang, pajak, PDRB, dan peran central place.
- **K3 = 3** → dukungan masyarakat beragam; isu politik–identitas lebih sensitif.

Opsi 2 – Kerja sama lintas wilayah (BKAD)

- **K1 = 4** → mampu memperbaiki koordinasi spasial meskipun tanpa perubahan batas resmi.
- **K2 = 4** → meningkatkan efisiensi layanan publik & konektivitas ekonomi, tapi mismatch fiskal masih tersisa.
- **K3 = 5** → paling mudah diterima masyarakat dan pemerintah daerah; tidak memubah batas administrasi.

Opsi 3 – Intensifikasi pemanfaatan ruang kota

- **K1 = 4** → mengurangi tekanan spasial & sprawl lewat pemanfaatan ruang dalam kota (hunian vertikal, revitalisasi).
- **K2 = 3** → memperbaiki efisiensi pusat kota tetapi dampaknya terhadap struktur ekonomi regional lebih terbatas.
- **K3 = 4** → cukup diterima, namun adaptasi budaya hunian vertikal memerlukan waktu.

C. Perhitungan Skor Tertimbang

Formula:

$$\text{Skor Tertimbang} = (K1 \times 5) + (K2 \times 4) + (K3 \times 3)$$

Skor Normalisasi (0–5):

$$\text{Skor Normalisasi} = \frac{\text{Skor Tertimbang}}{12}$$

Opsi 1 – Perluasan wilayah administrasi kota

$$(5 \times 5) + (5 \times 4) + (3 \times 3) = 25 + 20 + 9 = 54$$

$$\frac{54}{12} = 4,50$$

Opsi 2 – Kerja sama lintas wilayah (BKAD)

$$(4 \times 5) + (4 \times 4) + (5 \times 3) = 20 + 16 + 15 = 51$$

$$\frac{51}{12} = 4,25$$

Opsi 3 – Intensifikasi pemanfaatan ruang kota

$$(4 \times 5) + (3 \times 4) + (4 \times 3) = 20 + 12 + 12 = 44$$

$$\frac{44}{12} = 3,67$$

Tabel 20. Perhitungan Skro Tertimbang

No	Opsi Kebijakan	Skor K1	Skor K2	Skor K3	Bobot K1=5	Bobot K2=4	Bobot K3=3	Skor Tertimbang	Skor Normalisasi (0–5)
1	Perluasan wilayah administrasi kota	5	5	3	5	4	3	54	4,50
2	Kerja sama lintas wilayah (BKAD)	4	4	5	5	4	3	51	4,25
3	Intensifikasi pemanfaatan ruang kota	4	3	4	5	4	3	44	3,67

D. Interpretasi Akhir

1. Opsi terbaik (Skor tertinggi) = Perluasan wilayah administrasi kota (4,50)
→ paling kuat dari sisi spasial dan proyeksi ekonomi jangka panjang.
2. Opsi kedua = BKAD (4,25)
→ sangat kuat secara sosial-politik dan dapat dilakukan segera.
3. Opsi ketiga = Intensifikasi ruang kota (3,67)

5.2 Rekomendasi Kebijakan**A. Opsi Utama: Perluasan Wilayah Administrasi Kota**

Perluasan wilayah administrasi Kota Gorontalo menjadi rekomendasi ini karena memiliki skor tertinggi (4,50). Rekomendasi ini memperkuat konsistensi spasial antara wilayah fungsional yang sudah terintegrasi secara ekonomi, mobilitas, dan permukiman dengan wilayah administratif yang selama ini tertinggal. Implementasi opsi ini mencakup:

1. Penetapan batas wilayah baru melalui kajian akademis dan kesepakatan antardaerah.
2. Integrasi layanan publik (air bersih, persampahan, drainase, terminal, dan pendidikan) agar seluruh kawasan peri-urban mendapatkan pelayanan yang seragam.
3. Penyeragaman kebijakan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengatasi urban sprawl dan peningkatan risiko bencana.

B. Opsi Pendukung: Kerja Sama Lintas Wilayah (BKAD)

Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) memperoleh skor 4,25 dan menjadi rekomendasi pendukung yang paling feasible untuk dilaksanakan dalam jangka pendek. BKAD diperlukan sebagai tahapan transisi sebelum penetapan perluasan wilayah. Implementasi teknis meliputi:

1. Pembentukan Badan Kerja Sama dengan kewenangan operasional untuk mengatur transportasi, kebersihan, pengendalian lingkungan, dan pengembangan ekonomi kawasan.
2. Penetapan rencana induk kawasan metropolitan Gorontalo sebagai acuan bersama.
3. Mekanisme berbagi pembiayaan dan pendapatan daerah untuk mengurangi ketimpangan layanan.

C. Opsi Komplementer: Intensifikasi Pemanfaatan Ruang Kota

Intensifikasi ruang kota (skor 3,67) menjadi strategi komplementer yang harus tetap diintegrasikan untuk mengurangi tekanan konversi lahan di peri-urban. Kebijakan ini meliputi:

1. Revitalisasi kawasan padat melalui pembangunan hunian vertikal dan *mixed-use development*.
2. Optimalisasi lahan tidur dan aset pemerintah melalui mekanisme sewa jangka panjang.
3. Pengembangan jaringan transportasi publik dan pedestrian *friendly* untuk meningkatkan efisiensi ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Christaller, W. (1933). *Central Places in Southern Germany*.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.
- Perroux, F. (1950). *Economic Space: Theory and Applications*. *Quarterly Journal of Economics*.
- Alonso, W. (1964). *Location and Land Use*. Harvard University Press.
- UN-Habitat (2020). *World Cities Report*.
- BPS (2024). *Provinsi Gorontalo dalam Angka; Kota Gorontalo dalam Angka; Kabupaten Gorontalo dalam angka; Bone Bolango dalam Angka*.
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. RTRW Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango.
- KLHS Provinsi Gorontalo & KLHS Kota Gorontalo
- Daryanto, A. (2018). *Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiawan, A. (2020). *Kajian Peraturan Tata Ruang dalam Mengelola Pengembangan Kota*. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 14(2), 88–101. <https://doi.org/10.24258/jpw.v14i2.215>.
- Pramono, P. (2019). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dengan Pendekatan Citra Satelit di Kota X*. *Jurnal Geomatika*, 23(1), 45–58. <https://doi.org/10.24036/jg.v23i1.238>.
- Susanto, H. (2021). *Penggunaan Citra Satelit untuk Monitoring Perubahan Lahan di Wilayah Perkotaan*. *Jurnal Teknologi Penginderaan Jauh*, 7(3), 230–240. <https://doi.org/10.25077/jtpj.2021.07.03.012>.
- Priyono, D. (2020). *Aplikasi Analisis Autokorelasi Spasial dalam Perencanaan Wilayah*. *Jurnal Perencanaan Kota*, 12(2), 45–57. <https://doi.org/10.24072/jpk.v12i2.145>.
- Rahayu, S. (2021). *Pemetaan Pola Persebaran Penduduk dan Akses Layanan Menggunakan Analisis Spasial*. *Jurnal Sains dan Teknologi Pembangunan*, 14(1), 22–34. <https://doi.org/10.24913/jstp.2021.014.01.04>.
- Wahyuni, D. (2019). *Transformasi Wilayah Peri-Urban dalam Proses Urbanisasi di Indonesia*. *Jurnal Geografi*, 19(1), 101–115. <https://doi.org/10.24114/jg.v19i1.130>.

Setiawan, R. (2020). *Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Peri Urban*. Jurnal Perencanaan Wilayah, 14(3), 65–80. <https://doi.org/10.24258/jpw.v14i3.230>.